BUPATI KUTAI TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR 44 TAHUN 2013

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DI KABUPATEN KUTAI TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (1), Pasal 12, Pasal 15, Pasal 19 dan Pasal 21 Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, untuk memberikan kepastian hukum dan meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3263);

3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686), sebagaimanan telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3987);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Nomor 3962);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4287);

8. Undang-Undang...

8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5409);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara nomor 4050);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan Penetapan
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggung jawaban Bendahara Serta Penyampaiannya;
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 148/mk.7/2010 tentang Badan atau Lembaga Internasional yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
18. Peraturan Daerah Kabupatren Kutai Timur Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Timur.
2. Pemerintah Daerah Adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur.
3. Bupati adalah Bupati Kutai Timur.
4. Pejabat Adalah Pegawai yang diberi Tugas tertentu di bidang Perpajakan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
5. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur.

6. Badan...

6. Badan adalah Sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha mapun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiu, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah.
8. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yang selanjutnya disebut pajak, adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
9. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut Wilayah Kabupaten Kutai Timur.
10. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.

11. Sistem...

11. Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak yang selanjutnya disebut SISMIOP adalah sistem yang terintegrasi untuk mengolah informasi/data objek dan subjek pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan dengan bantuan komputer, sejak dari pengumpulan data (melalui pendaftaran, pendataan dan penilaian), pemberian identitas objek pajak (Nomor Objek Pajak), Perekaman data, pemeliharaan basis data, pencetakan hasil keluaran (berupa SPPT, STTS, DHKP, dan sebagainya) pemantauan penerimaan dan pelaksanaan penagihan pajak, sampai dengan pelayanan kepada wajib pajak.
12. Nilai jual Objek Pajak yang selanjutnya diangkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
13. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang tertuang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya.
14. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender.
15. Pajak yang tertuang adalah pajak yang harus dibayar dalam Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah.
16. Surat Pemberitahuan Objek Pahak yang selanjutnya disingkap SPOP, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah.

17. Surat...

17. Surat Pemberitahuan Pajak tertuang yang selanjutnya disingkap SPPT, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang tertuang kepada Wajib Pajak.
18. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkap SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
19. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang tertuang.
20. Surat Ketetapan Pajak Daerah lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang tertuang atau seharusnya tidak tertuang.
21. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa denda dan/atau bunga.
22. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah yang terdapat dalam SPPT, SKPD, SKPDN, SKPDLB, STPD Surat Keputusan Pembetulan atau Surat Keputusan Keberatan.
23. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas keberatan terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN atau SKPDLB yang diajukan oleh wajib pajak.
24. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh wajib pajak.

25. Pemeriksaan...

25. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun danmengola data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah.
26. Penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah yang terjadi dan menemukan tersangkanya.

BAB II

TATA CARA PENDAFTARAN, PENDATAAN DAN PENILAIAN

Pasal 2

(1) Pendaftaran, Pendataan dan Penilaian Objek Pajak dan Subjek Pajak dilakukan dengan SISMIOP untuk pemeliharaan dan pembentukan basis data.
(2) Pelaksanaan pembentukan basis data SISMIOP dilakukan melalui kegiatan:
    a. pendaftaran Objek Pajak dan Subjek Pajak;
    b. pendataan Objek Pajak dan Subjek Pajak; dan
    c. penilaian Objek Pajak.

Pasal 3

(1) Pendaftaran Objek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dilakukan oleh subjek pajak dengan cara mengisi Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP).
(2) SPOP diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani dan disampaikan ke Dinas Pendapatan Daerah selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal diterimanya SPOP oleh Subjek Pajak atau kuasanya.

(3) Formulir SPOP sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini dan dapat diperoleh dengan cuma-cuma di Dinas Pendapatan Daerah.

Pasal 4

(1) Pendataan Objek Pajak dan Subjek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah dengan menuangkan hasilnya dalam formulir SPOP.

(2) Pendataan Objek dan Subjek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan alternatif:
   a. penyampaian dan pemantauan pengembalian SPOP;
   b. identifikasi Objek Pajak;
   c. verifikasi data Objek Pajak; dan
   d. pengukuran bidang Ojek Pajak.

Pasal 5

(1) Penilaian objek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah baik secara massal maupun secara individual dengan menggunakan pendekatan penilaian yang telah ditentukan.

(2) Hasil Penilaian objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar penentuan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).

(3) Penilaian Obyek Pajak individual yang memenuhi salah satu dan/atau semua kreteria sebagai berikut:
   a. luas tanah lebih dari 10.000 $m^{2;}$
   b. luas bangunan lebih dari 1.000 $m^{2;}$
   c. jumlah lantai lebih dari 4 lantai;
   d. obyek pajak yang nilainya sama dengan atau lebih besar dari Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah); dan
   e. obyek pajak khusus.

Pasal 6

Dinas Pendapatan Daerah dapat melakukan kegiatan yang berkaitan dengan kebijakan pengembangan dan penyempurnaan SISMIOP.

Pasal 7

Pemeliharaan basis data SISMIOP dilakukan dengan cara:

a. pasif yaitu kegiatan pemeliharaan basis data yang dilakukan oleh Petugas Dinas Pendapatan Daerah berdasarkan laporan yang diterima dari wajib pajak dan/atau pejabat/instansi terkait pelaksanaannya;
b. aktif yaitu kegiatan pemeliharaan basis data yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah dengan cara mencocokkan dan menyesuaikan data objek pajak dan subjek pajak yang ada dengan keadaan sebenarnya di lapangan atau mencocokkan dan menyesuaikan NJOP dengan rata-rata nilai pasar yang terjadi di lapangan, pelaksanaannya sesuai dengan prosedur pembentukan basis data.

Pasal 8

Setiap petugas yang melaksanakan kegiatan pendaftaran, pendataan, dan penilaian objek pajak dan subjek pajak dalam rangka pembentukan dan/atau pemeliharaan basis data SISMIOP wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya atau diberitahukan oleh wajib pajak sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan Pajak Daerah.

Pasal 9

(1) Dalam melakukan kegiatan pendaftaran, pendataan dan penilaian objek pajak dan subjek pajak dalam rangka pembentukan dan/atau pemeliharaan basis data SISMIOP, Dinas Pendapatan Daerah dapat bekerjasama dengan instansi lain yang terkait.
(2) Pendataan dan penilaian objek pajak dan subjek pajak dalam rangka Pembentukan dan/atau pemeliharaan basis data SISMIOP dapat dilakukan oleh pihak ketiga yang memenuhi persyaratan teknis yang ditentukan.

BAB III...

BAB III

TATA CARA PENGISIAN DAN PENYAMPAIAN SPPT DAN SKPD

Pasal 10

(1) Formulir SPPT berisi informasi sebagai berikut:

a. Halaman depan:

1. Lambang Daerah Kabupaten Kutai Timur dan Kop Dinas Pendapatan Daerah;
2. Informasi berupa tulisan "SPPT PBB hanya untuk kepentingan Pajak Bukan Merupakan Bukti Kepemilikan Hak";
3. Kode Akun;
4. Tahun Pajak dan Jenis Sektor Pajak;
5. Nomor Obajek Pajak (NOP);
6. Letak Objek Pajak;
7. Nama dan Alamat Wajib Pajak;
8. Nomor Pokok Wajib Pajak;
9. Objek Pajak;
10. Luas Bumi dan/atau bangunan;
11. Kelas Bumi dan/atau bangunan;
12. Nilai Jual Objek Pajak (NJOP);
13. Total NJOP Bumi dan/atau bangunan;
14. NJOP Sebagai dasar pengenaan PBB;
15. Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP);
16. NJOP untuk Perhitungan PBB;
17. Nilai Jual Kena Pajak (NJKP);
18. PBB yang harus dibayar;
19. Tanggal jatuh Tempo; dan
20. Tempat Pembayaran.

b. Halaman Belakang:

1. nama petugas penyampai SPPT;
2. tanggal Penyampaian;
3. tanda Tangan Petugas; dan
4. informasi Lainnya.

(2). SPPT...

(2) SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan formulir kertas.

(3) Formulir SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

(1) Penandatanganan SPPT dapat dilakukan dengan:
   a. tanda tangan basah untuk Ketetapan Buku V;
   b. cap tanda tangan untuk Ketetapan Buku III dan IV; dan
   c. cetakan tanda tangan untuk Ketetapan Buku I dan II.

(2) SPPT dapat diterbitkan melalui:
   a. pencetakan massal; atau
   b. pencetakan dalam rangka.
      1. pembuatan salinan SPPT;
      2. penerbitan SPPT sebagai tindak lanjut suatu keputusan yaitu keputusan keberatan, keputusan pengurangan ketetapan atau keputusan pembetulan;
      3. selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 SPPT dipergunakan sebagai tindak lanjut pendaftaran objek pajak baru dan mutasi objek pajak dan/atau subjek pajak.

Pasal 12

(1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat mengeluarkan SKPD dalam hal:
   a. SPOP tidak disampaikan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal diterimanya SPOP dan setelah wajib pajak ditegur secara tertulis;
   b. berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah pajak yang tertuang lebih besar dari jumlah pajak yang dihitung berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh wajib pajak.

(2). Formulir...

(2) Formulir SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

(1) Kepala Petugas Dispenda menyampaikan SPPT kepada petugas pemungut dengan disertai daftar penerimaan.
(2) Petugas pemungut memisahkan dan mengkompilasi SPPT berdasarkan alamat objek pajak selama lebih kurang 1 (satu) bulan sejak diterimanya SPT.
(3) Petugas pemungut menyampaikan SPPT kepada wajib pajak untuk ketetapan Buku I, Buku II, BUku III, Buku IV melalui Aparat Desa/Kelurahan/RT atau petugas yang ditunjuk dan dituangkan kedalam berita acara penerimaan SPPT, sedangkan untuk ketetapan Buku V disampaikan langsung kepada wajib pajak atau wakilnya.

Pasal 14

(1) Sebagai bukti bahwa wajib pajak telah menerima SPPT, maka Struk SPPT harus ditandatangani oleh wajib pajak atau wakilnya dengan mencantumkan secara jelas nama dan tanggal diterimanya SPPT dimaksud.
(2) Struk SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada bagian bawah SPPT, selanjutnya disampaikan kepada petugas
(3) Petugas Dispenda menghimpun struk SPPT yang diterima dari wajib pajak kemudian dicatat dalam daftar rekapitulasi penyampaian SPPT.

BAB IV

TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 15

(1) Pembayaran Pajak dilakukan:
    a. kas Daerah melalui loket pembayaran Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur;

b. mobil kas keliling Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur;
c. teller dan/atau ATM Bankaltim; dan
d. teller dan/atau ATM Bank Lain yang ditunjuk.

(2) Apabila pembayaran pajak dilakukan pada Loket Kas Daerah dan Mobil Kas Keliling Dinas Pendapatan Daerah, penerimaan pajak harus disetor ke Kas Daerah paling lambar (1) satu hari kerja.

(3) Pembayaran Pajak yang menggunakan warkat seperti bilyet giro atau cek, atau dengan cara transfer, baru dapat dinyatakan sah apabila telah dibukukan pada Kas Daerah.

(4) Wajib Pajak yang telah melakukan pembayaran Pajaknya diberikan SSPD sebagai tanda bukti pembayaran Pajak.

(5) Bentuk dan isi formulir SSPD sebagai tanda bukti pemabyaran Pajak sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Bupati ini.

(6) Bentuk dan isi Formulir SSPD yang dikeluarkan oleh bank yang ditunjuk sebagai tempat pembayaran pajak dipersamakan dengan SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Pasal 16

(1) Pembayaran Pajak dilakukan sekaligus atau lunas.

(2) Jatuh tempo pembayaran dan penyetoran Pajak yang tertuang paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh wajib pajak.

Pasal 17

(1) Pajak yang masih harus dibayar dalam SKPD, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, harus dilunasi dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterbitkan.

(2). Wajib...

(2) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati Up Kepala Dinas Pendapatan Daerah untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak yang masih harus dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang selanjutnya disebut Utang Pajak, dalam hal wajib pajak mengalami kesulitan likuiditas atau mengalami keadaan diluar kekuasaannya sehingga wajib pajak tidak akan mampu memenuhi kewajiban pajak pada waktunya.

(3) Dalam hal Wajib Pajak disetujui untuk mengangsur atau menunda pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kecuali STPD, wajib pajak dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dihitung sejak jatuh tempo pembayaran sampai dengan pembayaran angsuran/pelunasan.

(4) Permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus diajukan secara tertulis paling lama 9 (sembilan) hari kerja sebelum jatuh tempo pembayaran, disertai dengan alasan dan bukti yang mendukung permohonan, serta:

a. jumlah pembayaran Pajak yang dimohon untuk diangsur, masa angsuran, dan besarnya angsuran; atau
b. jumlah Pembayaran Pajak yang dimohon untuk ditunda dan jangka waktu penundaan.

(5) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilampaui dalam hal wajib pajak mengalami keadaan diluar kekuasaan wajib pajak sehingga wajib pajak tidak mampu melunasi utang pajak tepat pada waktunya.

(6) Formulir Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Bupati ini.

Pasal 18

(1) Wajib Pajak yang mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Ayat (2) harus memberikan jaminan yang besarnya ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah kecuali apabila Kepala Dinas Pendapatan Daerah menganggap tidak perlu.

(2) Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa garansi bank, surat/dokumen bukti kepemilikan barang bergerak, penangungan utang oleh pihak ketiga, sertifikat tanah atau sertifikat deposito.

(3) Wajib Pajak yang mengajukan permohonan dalam jangka waktu yang melampaui jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) harus memberikan jaminan berupa garansi bank sebesar utang pajak yang dapat dicairkan sesuai dengan jangka waktu pengangsuran atau penundaan.

Pasal 19

(1) Angsuran atas utang pajak dapat diberikan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterbitkannya Surat Keputusan Persetujuan Angsuran Pembayaran Pajak dengan angsuran paling banyak (1) satu kali dalam 1 (satu) bulan, untuk permohonan angsuran atas utang pajak yang masih harus dibayar.

(2) Penundaaan atas utang pajak dapat diberikan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterbitkannya Surat Keputusan Penundaan Pembayaran Pajak untuk permohonan penundaan atas utang pajak berupa pajak yang masih harus dibayar.

(3) Formulir Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Bupati ini.

Pasal 20

(1) Besarnya pembayaran angsuran atas utang pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) ditetapkan dalam jumlah utang pajak untuk tiap angsuran.

(2) Besarnya pelunasan atas penundaan utang pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) ditetapkan sejumlah utang pajak yang ditunda pelunasannya

(3) Bunga yang timbul akibat angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan saldo utang pajak.

(4). Bunga...

(4) Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditagih dengan menerbitkan STPD pada setiap tanggal jatuh tempo angsuran, jatuh tempo penundaan atau pada tanggal pembayaran.

(5) Formulir STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagaimana tercantum dalm Lampiran VII Peraturan Bupati ini.

(6) Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan terhadap angsuran atau penundaan atas pembayaran STPD.

Pasal 21

(1) Setelah mempertimbangkan alasan berikut bukti pendukung yang diajukan oleh Wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) huruf a, dalam jangka waktu 14 (empat belas hari) kerja setelah tanggal diterimanya permohonan secara lengkap diterbitkan Surat Keputusan.

(2) Surat Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:

a. menyetujui jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai degan permohonan Wajib Pajak;

b. menyetujui jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan pertimbangan Kepala Dinas Pendapatan daerah; atau

c. menolak permohonan wajib pajak.

(3) Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui dan tidak diterbitkan suatu keputusan, permohonan disetujui sesuai dengan permohonan Wajib Pajak dan Surat Keputusan Persetujuan Penundaan Pembayaran Pajak harus diterbitkan paling lama 10 (Sepuluh) hari kerja setelah jangka waktu 14 (empat belas) haru kerja tersebut berakhir.

(4). Dalam...

(4) Dalam hal permohonan wajib pajak disetujui, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan Surat Keputusan Persetujuan Angsuran Pembayaran pajak atau Surat Keputusan Persetujuan Penundaan Pembayaran Pajak;

(5) Dalam hal permohonan wajib pajak ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan Surat Keputusan Penolakan Angsuran /Penundaan Pembayaran Pajak.

Pasal 22

(1) Dalam hal terhadap wajib pajak yang sedang mengajukan permohonan untuk mengangsur atau menunda pembayaran Pajak yang diterbitkan SKPDLB pengembalian kelebihan pembayaran pajak dan/atau pemberian imbalan bunga tersebut terlebih dahulu diperhitungkan dengan sisa utang pajak yang belum diangsur atau yang ditunda pembayaranya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Pajak Daerah.

(2) Dalam hal besarnya kelebihan pembayaran Pajak dan/atau pemberian imbalan bunga lebih kecil dari utang Pajak yang belum diangsur, besarnya angsuran dari sisa utang pajak ditetapkan kembali dengan ketentuan:
   a. jumlah pokok dan bunga setiap angsuran tidak lebih dari jumlah setiap angsuran yang telah disetujui;
   b. masa angsuran paling lama sama dengan sisa masa angsuran yang telah disetujui.

(3) Penetapan kembali besarnya angsuran dan/atau masa angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan:
   a. memberitahukan kepada wajib pajak tentang pemindahbukuan/pembayaran dan perubahan saldo utang pajak serta permintaan usulan perubahan angsuran;

b. wajib...

b. wajib pajak harus menyampaikan usulan perubahan angsuran paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal penerbitan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP); dan

c. menerbitkan Surat Keputusan Persetujuan Angsuran Pembayaran Pajak yang juga berfungsi sebagai pembatalan Surat Keputusan Persetujuan Angsuran Pembayaran sebelumnya berdasarkan usulan yang disampaikan oleh wajib pajak paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal diterimanya usulan wajib pajak.

(4) Dalam hal sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak menerima usulan perubahan angsuran dari Wajib Pajak, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan Surat Keputusan Persetujuan Angsuran Pembayaran Pajak dengan:

a. nilai angsuran adalah sebesar sisa utang pajak dibagi dengan sisa masa angsuran; dan

b. masa angsuran adalah sisa masa angsuran yang disetujui.

(5) Surat Keputusan Persetujuan Angsuran Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berfungsi sebagai pembatalan atas Surat Keputusan Persetujuan Angsuran Pembayaran Pajak sebelumnya.

(6) Dalam hal besarnya kelebihan pembayaran pajak dan/atau pemberian imbalan bunga tidak mencukupi untuk melunasi utang pajak yang ditunda, wajib pajak tetap melunasi sisa utang pajak yang ditunda, wajib pajak tetap melunasi utang pajak tersebut paling lama sesuai dengan jangka waktu penundaan.

BAB V

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 23

(1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD jika SPPT atau SKPD tidak atau kurang bayar setelah jatuh tempo.

(2) Surat Teguran sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak, dikeluarkan 7 (tujuh) hari kerja sejak saat jatuh tempo pembayaran STPD / Keputusan Pembetulan / Keputusan Keberatan / Putusan Banding.

(3) Dalam jangka waktu 21 (Dua puluh satu) harikerja setelah tanggal surat teguran, wajib pajak harus melunasi pajak yang tertuang

(4) STPD dan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Bupati ini.

Pasal 24

(1) Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran Jumlah Pajak yang harus dibayar dapat ditagih dengan surat paksa sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX.

(2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan Surat paksa setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis.

Pasal 25

Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi jangka waktu 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam sesudah tanggal pemberitahuan Surat paksa diterima wajib pajak, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk segera menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.

Pasal 26

(1) Apabila utang pajak dan biaya penagihannya yang masih harus dibayar tidak dilunasi setelah lewat waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal pengumuman lelang maka segera dilakukan penjualan barang sitaan melalui kantor lelang.

(2). Penjualan...

(2) Penjualan barang sitaan yang dikecualikan dari penjualan lelang dapat dilakukan apabila utang dan biaya penagihannya yang masih harus dibayar tidak dilunasi setelah lewat waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal pelaksanaan penyitaan maka segera dilakukan penjualan, penggunaan, dan/atau pemindahbukukan barang sitaan.

Pasal 27

(1) Juru Sita Pajak Daerah melaksanakan Penagihan Seketika dan Sekaligus tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran berdasarkan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus yang diterbitkan oleh Pejabat pada Dinas Pendapatan apabila:
   a. penanggung pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu;
   b. penangung pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan perusahaan atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia;
   c. terdapat tanda-tanda bahwa Penanggung Pajak akan membubarkan bidang usaha, atau menggabungkan usaha, atau memekarkan usaha atau memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya atau melakukan perubahan bentuk lainnya;
   d. Badan usaha akan dibubarkan oleh Negara; atau
   e. terjadi penyitaan atas barang penanggung pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan.

(2) Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus sekurang-kurangnya memuat:
   a. nama wajib pajak atau nama wajib pajak dan penangung pajak;
   b. besarnya utang pajak;
   c. perintah untuk membayar;
   d. waktu pelunasan pajak.

(3). Penerbitan...

(3) Penerbitan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekalligus oleh pejabat pada Dinas Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. diterbitkan sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran;
b. diterbitkan tanpa didahului surat teguran;
c. diterbitkan sebelum jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak surat teguran diterbitkan; atau
d. diterbitkan sebelum penerbitan surat paksa.

BAB VI

TATA CARA PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI DAN PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN

Pasal 28

Bupati atau Kepala Dinas Pendapatan Daerah karena jabatan atau atas permohonan wajib pajak dapat:

a. Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administratif PBB Perkotaan Perdesaan berupa bunga, denda, dan kenaikan yang dikenakan karena kekhilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahan wajib pajak; dan/atau
b. Mengurangkan SPPT, SKPD PBB Perkotaan dan Perdesaan, atau STPD PBB Perkotaan dan Perdesaan; dan/atau
c. Membatalkan SPPT, SKPD PBB Perkotaan Perdesaan, STPD PBB Perkotaan Perdesaan, atau SKPDLB PBB Perkotaan Perdesaan, yang tidak benar.

Pasal 29

(1) Pengurangan atau penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, dapat dilakukan terhadap sanksi administratif yang tercantum dalam:

a. SPPT;
b. SKPD PBB; atau
c. STPD PBB.

(2). Penghapusan...

(2) Penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, yaitu wajib pajak orang pribadi yang mengalami kesulitan keuangan atau wajib pajak badan yang mengalami kesulitan likuiditas.

(3) Pengurangan SPPT, SKPD PBB, STPD PBB, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, dapat dilakukan dalam hal ketidakmampuan wajib pajak dalam melakukan pembayaran atas pajak terutang.

(4) Pembatalan SPPT, SKPD PBB, STPD PBB, SKPDLB PBB, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c, dapat dilakukan apabila SPPT, SKPD PBB, STPD PBB, SKPDLB PBB, karena:

a. bukan merupakan objek PBB Perkotaan;
b. adanya satu objek PBB Perkotaan yang terbit dua/lebih SPPT;
c. adanya SPPT atas tanah yang sudah terbagi habis dan masing-masing bagian sudah muncul SPPT sendiri;
d. obyek PBB yang tidak diketahui pemiliknya dan selama 5 (lima) tahun tidak memenuhi pembayaran atas pajak terutang.

Pasal 30

(1) Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, harus memenuhi persyaratan:

a. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) SKPD PBB, STPD PBB, atau SPPT;
b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya sanksi administratif yang dimohonkan pengurangan atau penghapusan disertai alasan yang mendukung permohonannya;
c. diajukan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pendapatan Daerah;

d. dilampiri...

d. dilampiri fotocopy SPPT, SKPD PBB, atau STPD PBB, yang dimohonkan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif;
e. wajib pajak tidak pernah mengajukan keberatanatas SPPT dalam hal yang diajukan permohonan pengurangan atau penghapusan adalah sanksi administratif yang tercantum dalam SPPT;
f. wajib pajak tidak pernah mengajukan keberatanatas SKPD PBB Perkotaan dalam hal yang diajukan permohonan pengurangan atau penghapusan adalah sanksi administratif yang tercantum dalam SKPD PBB Perkotaan; dan
g. surat permohonan ditandatangani oleh wajib pajak dan dalam hal permohonan ditandatangani oleh bukan wajib pajak, maka harus dilampiri dengan surat kuasa.

(2) Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.

Pasal 31

(1) Permohonan pengurangan SPPT, SKPD PBB, atau STPD PBB, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b, harus memenuhi persyaratan:
a. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) SPPT, SKPD PBB, atau STPD PBB;
b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya ketetapan yang dimohonkan pengurangan disertai alasan yang mendukung permohonannya;
c. diajukan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pendapatan Daerah;
d. dilampiri Fotocopi asli SPPT, SKPD PBB, STPD PBB, yang dimohonkan pengurangan;
e. dilampiri fotocopi bukti pelunasan PBB tahun sebelumnya;

f. wajib...

f. wajib pajak tidak mengajukan keberatan atau mengajukan keberatan namun tidak dapat dipertimbangkan, atas SPPT, SKPD PBB, dalam hal yang diajukan permohonan pengurangan adalah SPPT, SKPD PBB;

g. tidak diajukan keberatan atas SPPT atau SKPD PBB, yang dimohonkan Pengurangan, atau dalam hal diajukan keberatan telah diterbitkan Surat Keputusan Keberatan dan atas Surat Keputusan Keberatan dimaksud tidak diajukan banding; dan

h. Surat permohonan ditandatangani oleh wajib pajak dan dalam hal permohonan ditandatangani oleh bukan wajib pajak, maka harus dilampiri dengan Surat Kuasa.

(2) Wajib Pajak yang mengajukan keberatan kemudian mencabut keberatannya tersebut, tidak termasuk pengertian wajib pajak yang tidak mengajukan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan huruf f.

(3) Permohonan pengurangan SPPT, SKPD PBB, STPD PBB, yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkandan kepada wajib pajak atau kuasanya diberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari.

Pasal 32

(1) Permohonan pembatalan SPPT, SKPD PBB, STPD PBB, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, diajukan secara perseorangan, kecuali untuk SPPT dapat juga diajukan secara kolektif.

(2) Permohonan pembatalan yang diajukan secara perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan:

a. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) SPPT, SKPD PBB, STPD PBB;

b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan alasan yang mendukung permohonannya;

c. diajukan kepada Walikota melalui Kepala Dinas;
d. dilampiri asli SPPT, SKPD PBB, STPD PBB, tahun yang bersangkutan yang dimohonkan pembatalan;
e. surat pengantar dari kelurahan/desa untuk pengajuan pembatalan SPPT secara kolektif; dan
f. Surat permohonan ditandatangani oleh wajib pajak dan dalam hal permohonan ditandatangani oleh bukan wajib pajak, maka harus dilampiri dengan Surat Kuasa Khusus.

(3) Permohonan pembatalan untuk SPPT yang diajukan secara kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan:
a. 1 (satu) permohonan untuk beberapa SPPT Tahun Pajak yang sama dengan pajak yang terutang untuk setiap SPPT paling banyak Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan alasan yang mendukung permohonannya;
c. permohonan diajukan melalui Lurah/Kepala desa setempat;
d. dilampiri asli SPPT yang dimohonkan pembatalan; dan
e. disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pendapatan Daerah.

(4) Permohonan pembatalan SPPT, SKPD PBB, STPD PBB, secara perseorangan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan dan kepada wajib pajak atau kuasanya diberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari.

(5) Pembatalan SPPT, SKPD PBB, STPD PBB, dapat dilakukan apabila SPPT, SKPD PBB, STPD PBB, tersebut seharusnya tidak diterbitkan karena bukan merupakan Objek Pajak Bumi dan Bangunan, yang meliputi:
a. digunakan oleh Pemerintah dan Daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan;

b. digunakan...

b. digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan, sebagai berikut:
   1. bidang ibadah, meliputi masjid, gereja, pura, vihara dan klenteng;
   2. bidang sosial, meliputi panti asuhan, Balai Rukun Tetangga/Rukun Warga, panti jompo;
   3. bidang kesehatan, meliputi Rumah Sakit Pemerintah dan Puskesmas;
   4. bidang pendidikan, meliputi TK, SD, SMP dan SMA/SMK; dan
   5. bidang kebudayaan nasional;
c. digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala atau yang sejenis dengan itu;
d. merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
e. digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
f. digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.

(6) Permohonan pembatalan SPPT secara kolektif yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan dan kepada Lurah/Kepala Desa setempat diberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari guna disampaikan kepada wajib pajak atau kuasanya.

Pasal 33

(1) Pemberian pengurangan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, dapat diberikan kepada wajib pajak orang pribadi atau badan sebesar-besarnya 50 % (lima puluh persen) per ketetapan pajak.

(2). Pemberian...

(2) Pemberian pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, dapat diberikan kepada wajib pajak:

a. karena kondisi tertentu objek pajak yang ada hubungannya dengan subjek pajak dan/atau wajib pajak karena sebab-sebab tertentu lainnya:

1. Wajib Pajak Pribadi, meliputi:

a) objek pajak yang wajib pajaknya orang pribadi veteran pejuang kemerdekaan, veteran pembela kemerdekaan, penerima tanda jasa bintang gerilya, atau janda/dudanya diberikan pengurangan sebesar-besarnya 75 % (tujuh puluh lima persen) dari PBB yang terutang.

b) wajib pajak yang penghasilannya semata-mata berasal dari objek pajak berupa lahan pertanian/perkebunan/perikanan/peternakan yang hasilnya sangat terbatas diberikan pengurangan sebagai berikut:

1) luasan sampai dengan 1 ha (satu hektar) diberikan pengurangan sebesar-besarnya 50 % (lima puluh persen) dari PBB yang terutang;

2) luasan lebih dari 1 ha (satu hektar) diberikan pengurangan sebesar-besarnya 25 % (dua puluh lima persen) dari PBB yang terutang;

c) objek pajak yang wajib pajaknya orang pribadi yang penghasilannya semata-mata berasal dari pensiunan pegawai negeri/pensiunan BUMN/pensiunan BUMD, sehingga kewajiban membayar PBB sulit dipenuhi diberikan pengurangan sebagai berikut:

1) golongan I atau yang setara, diberikan pengurangan sebesar-besarnya 75% (tujuh puluh lima persen) dari PBB yang terutang;

2) golongan II atau yang setara, diberikan pengurangan sebesar-besarnya 55% (lima puluh lima persen) dari PBB yang terutang;

3). golongan...

3) golongan III atau yang setara, diberikan pengurangan sebesar-besarnya 40% (empat puluh persen) dari PBB Perkotaan yang terutang;
4) golongan IV atau yang setara, diberikan pengurangan sebesar-besarnya 25% (dua puluh lima persen) dari PBB yang terutang;

d) objek pajak yang wajib pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah sehingga kewajiban membayar PBB sulit dipenuhi diberikan pengurangan sebagai berikut:
1) penghasilan sampai dengan Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) perbulan, diberikan pengurangan sebesar-besarnya 50 % (lima puluh persen) dari PBB yang terutang;
2) penghasilan antara Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) perbulan, diberikan pengurangan sebesar-besarnya 25 % (dua puluh lima persen) dari PBB yang terutang; dan
3) penghasilan lebih dari Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) perbulan, diberikan pengurangan sebesar-besarnya 10 % (sepuluh persen) dari PBB yang terutang;

e) objek pajak yang wajib pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah dan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) per meter perseginya meningkat akibat perubahan lingkungan dan dampak positif pembangunan diberikan pengurangan sebagai berikut:
1) meningkat lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) akibat perubahan lingkungan dan dampak positif pembangunan, diberikan pengurangan sebesar-besarnya 50% (lima puluh persen);

2).meningkat...

2) meningkat antara 50% (lima puluh persen) sampai dengan 75% (tujuh puluh lima persen) akibat perubahan lingkungan dan dampak positif pembangunan, diberikan pengurangan sebesar-besarnya 25% (dua puluh lima persen); dan

3) meningkat antara 25% (dua puluh lima persen) sampai dengan kurang dari 50% (lima puluh persen) akibat perubahan lingkungan dan dampak positif pembangunan, diberikan pengurangan sebesar-besarnya 10% (sepuluh persen).

f) objek pajak yang berupa cagar budaya yang telah ditetapkan sebagai bangunan dan/atau lingkungan cagar budaya diberikan pengurangan sebesar 50% (lima puluh persen).

2. Wajib Pajak Badan, meliputi:

a) perguruan tinggi swasta, diberikan pengurangan sebesar-besarnya 50% (lima puluh persen); dan

b) wajib pajak badan yang mengalami kerugian pada tahun pajak sebelumnya dan mengalami kesulitan likuiditas, dapat diberikan pengurangan sebesar-besarnya 50% (lima puluh persen).

b. karena kondisi tertentu objek pajak yang ada hubungannya dengan objek pajak itu sendiri diberikan pengurangan sebesar-besarnya 100% (seratus persen), meliputi:

1. dalam hal objek pajak terkena bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain gempa bumi, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor dan bencana lainnya; dan

2. dalam hal objek pajak terkena sebab lain yang luar biasa, meliputi kebakaran dan wabah penyakit/hama tanaman.

(3) Perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 2 huruf a, harus memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut:

a. sumbangan pembinaan pendidikan dan pungutan lainnya dengan nama apapun rata-rata sampai dengan Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) per tahun;
b. luas bangunan sampai dengan 2.000 m2 (dua ribu meter persegi);
c. lantai/tingkat bangunan kurang dari 4 lantai;
d. luas tanah sampai dengan 20.000 m2 (dua puluh ribu meter persegi); dan
e. jumlah mahasiswa sampai dengan 1.500 (seribu lima ratus) mahasiswa;

(4) Pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 2 huruf a), tidak termasuk pada bumi dan/atau bangunan yang dikuasai, dimiliki dan/atau dimanfaatkan oleh perguruan tinggi tetapi secara nyata tidak dimanfaatkan untuk penyelenggaraan pendidikan secara langsung yang terletak diluar lingkungan perguruan tinggi yang bersangkutan.

Pasal 34

(1) Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2), diberikan kepada Wajib Pajak atas PBB yang terutang yang tercantum dalam SPPT dan/atau SKPD PBB.
(2) PBB terutang yang tercantum dalam SPPT dan/atau SKPD PBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu pokok pajak.
(3) Apabila pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2), telah diberikan, maka tidak dapat dimintakan pengurangan sanksi administratif.

Pasal 35

(1) Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, dapat diberikan berdasarkan permohonan Wajib Pajak.
(2) Permohonan pengurangan pajak terutang wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diajukan secara:

a. perseorangan...

a. perseorangan, untuk PBB yang terutang yang tercantum dalam SKPD PBB dan STPD PBB;
b. perseorangan atau kolektif untuk PBB yang tercantum dalam SPPT.

Pasal 36

Permohonan pengurangan yang diajukan secara perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2), harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan Pasal 31 .

Pasal 37

(1) Pengurangan Ketetapan PBB harus diajukan dalam jangka waktu:
   a. 3 (tiga) bulan sejak diterbitkannya SPPT atau SKPD PBB atau 3 (tiga) bulan sebelum tanggal 31 Juli tahun berkenaan kecuali apabila wajib pajak atau kuasanya dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya;
   b. 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterbitkannya STPD PBB;
   c. 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya bencana alam;
   d. 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya sebab lain yang luar biasa, kecuali apabila wajib pajak dapat menunjukkan dalam jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
(2) Pengurangan Ketetapan PBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak memiliki tunggakan PBB Tahun pajak sebelumnya atas objek pajak yang dimohonkan pengurangan, kecuali dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa.
(3) Pengurangan Ketetapan PBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak diajukan keberatan atas SPPT atau SKPD PBB atau STPD PBB yang dimohonkan pengurangan.

Pasal 38

Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, dan permohonan pengurangan atau pembatalan SPPT, SKPD PBB, STPD PBB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b, dapat diajukan oleh wajib pajak hanya1 (satu) kali dalam tahun pajak yang sama.

Pasal 39

Dokumen pendukung yang digunakan untuk mengajukan permohonan pengurangan ketetapan PBB yang diajukan secara perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, meliputi:

a. Wajib Pajak Pribadi, meliputi:
   1. Objek Pajak yang wajib pajaknya orang pribadi veteran pejuang kemerdekaan, pembela kemerdekaan, penerima tanda jasa bintang gerilya, atau janda/dudanya berupa:
      a) fotocopy kartu tanda anggota veteran, atau fotocopy Keputusan tentang pengakuan, pengesahan dan penganugerahan gelar kehormatan dari pejabat yang berwenang;
      b) fotocopy Keputusan pengurangan tahun sebelumnya;
      c) fotocopy SPPT tahun berkenaan;
      d) fotocopy bukti pelunasan PBB tahun pajak sebelumnya;
      e) fotocopy slip gaji pensiun sebagai anggota veteran pejuang kemerdekaan, pembela kemerdekaan, penerima tanda jasa bintang gerilya, atau janda/dudanya; dan
      f) fotocopy bukti pembayaran rekening tagihan listrik, air dan/atau telepon bulan terakhir.
   2. Objek Pajak yang wajib pajaknya orang pribadi yang penghasilannya semata-mata berasal dari pensiunan pegawai negeri/pensiunan BUMN/pensiunan BUMD sehingga kewajiban membayar PBB sulit dipenuhi berupa:
      a) fotocopy Keputusan pensiun;
      b) fotocopy Keputusan pengurangan tahun sebelumnya;
      c) fotocopy SPPT tahun berkenaan;

d). fotocopy...

d) fotocopy slip gaji pensiun atau dokumen sejenis lainnya;
e) fotocopy KTP dan/atau Kartu Identitas Lainnya;
f) fotocopy kartu keluarga;
g) fotocopy bukti pelunasan PBB tahun pajak sebelumnya; dan
h) fotocopy bukti pembayaran rekening tagihan listrik, air dan/atau telepon bulan terakhir.

3. Objek Pajak yang wajib pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah sehingga kewajiban membayar PBB sulit dipenuhi berupa:
   a) surat pernyataan dari wajib pajak yang menyatakan bahwa penghasilan wajib pajak rendah, yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Kelurahan/Desa;
   b) fotocopy Keputusan pengurangan tahun sebelumnya;
   c) fotocopy SPPT tahun berkenaan;
   d) fotocopy KTP dan/atau Kartu Identitas Lainnya;
   e) fotocopy kartu keluarga;
   f) fotocopy slip gaji atau dokumen lain yang sejenis;
   g) fotocopy bukti pembayaran rekening tagihan listrik, air dan/atau telepon bulan terakhir; dan
   h) fotocopy bukti pelunasan PBB tahun pajak sebelumnya;
4. Objek Pajak yang wajib pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah dan nilai jual objek pajak per meter persegi meningkat akibat perubahan lingkungan dan dampak pembangunan berupa:
   a) surat pernyataan dari wajib pajak yang menyatakan bahwa penghasilan wajib pajak rendah, yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Kelurahan/Desa;
   b) fotocopy SPPT tahun berkenaan;
   c) fotocopy Keputusan pengurangan tahun sebelumnya;
   d) fotocopy KTP dan/atau Kartu Identitas lainnya;
   e) fotocopy kartu keluarga;
   f) fotocopy bukti pembayaran rekening tagihan listrik, air dan/atau telepon bulan terakhir; dan

g) fotocopy bukti pelunasan PBB tahun pajak sebelumnya;

5. Objek Pajak yang wajib pajaknya orang pribadi yang berupa cagar budaya yang telah ditetapkan sebagai bangunan dan/atau lingkungan cagar budaya berupa:
   a) Keputusan Bupati tentang Penetapan Bangunan dan/atau Lingkungan sebagai Bangunan dan/atau Lingkungan Cagar Budaya yang dilegalisir oleh Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah;
   b) fotocopy SPPT tahun berkenaan;
   c) fotocopy KTP dan/atau Kartu Identitas Lainnya;
   d) fotocopy kartu keluarga;
   e) fotocopy bukti pembayaran rekening tagihan listrik, air dan/atau telepon bulan terakhir; dan
   f) fotocopy bukti pelunasan PBB tahun pajak sebelumnya.

   b. Wajib Pajak Badan, meliputi:
      1. wajib pajak perguruan tinggi swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf a angka 2 huruf a), berupa:
         a) fotocopy SPPT tahun berkenaan;
         b) laporan keuangan (antara lain neraca awal dan neraca akhir tahun) yang telah diaudit oleh aparat pengawasan fungsional pemerintah dan/atau akuntan publik; dan
         c) laporan penerimaan dan pengeluaran rutin.
      2. wajib pajak badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a angka 2 huruf b), yang mengalami kerugian dan kesulitan likuiditas tahun pajak sebelumnya sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban rutin, berupa:
         a) fotocopy SPPT tahun berkenaan;
         b) fotocopy akta pendirian perusahaan atau yayasan;
         c) fotocopy laporan keuangan tahun sebelumnya;

d). fotocopy...

d) fotocopy *cash flow* perusahaan yang telah diaudit akuntan publik;
e) keputusan dari Mahkamah Agung tentang kerugian dan kesulitan likuiditas;
f) fotocopy SPT PPh Badan tahun pajak sebelumnya; dan
g) fotocopy bukti pelunasan PBB tahun pajak sebelumnya.

Pasal 40

Dokumen pendukung untuk permohonan wajib pajak yang diajukan secara perseorangan dalam hal objek pajaknya terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa berupa:

a. surat pernyataan dari wajib pajak yang menyatakan objek pajaknya terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa; dan
b. surat keterangan yang mendukung alasan permohonan dari Lurah/Kepala Desa setempat atau Instansi terkait.

Pasal 41

Permohonan pengurangan yang diajukan secara kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2), harus memenuhi persyaratan dan data pendukung.

Pasal 42

Permohonan pengurangan secara kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, dapat diajukan:

a. dalam hal kondisi tertentu yaitu objek pajak yang wajib Pajaknya orang pribadi veteran pejuang kemerdekaan, veteran pembela kemerdekaan, penerima tanda jasa bintang gerilya, atau janda/dudanya dengan PBB yang terutang kurang dari Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
b. dalam hal PBB yang terutang kurang dari Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), yaitu:
    1. objek pajak berupa lahan pertanian/perkebunan/ perikanan/peternakan yang hasilnya sangat terbatas yang wajib pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah;

2. objek pajak yang wajib pajaknya orang pribadi yang penghasilannya semata-mata berasal dari pensiunan pegawai negeri/pensiunan BUMN/pensiunan BUMD;
3. objek pajak yang wajib pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah sehingga kewajiban membayar PBB sulit dipenuhi;
4. objek pajak yang wajib pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah yang NJOP per meter perseginya meningkat akibat perubahan lingkungan dan dampak pembangunan;
5. dalam hal objek pajak terkena bencana alam bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain gempa bumi, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor; dan
6. dalam hal objek pajak terkena sebab lain yang luar biasa, meliputi kebakaran, wabah penyakit tanaman dan/atau wabah hama tanaman.

c. dalam jangka waktu:
   1. 3 (tiga) bulan sejak diterbitkannya SPPT atau 3 (tiga) bulan sebelum tanggal 31 Juli tahun berkenaan kecuali apabila Wajib Pajak atau kuasanya dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya;
   2. 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya bencana alam; dan
   3. 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya sebab lain yang luar biasa, kecuali apabila wajib pajak melalui pengurus LVRI setempat, pengurus organisasi terkait lainnya atau Lurah/Kepala Desa, dapat menunjukkan bahwa dalam jangka waktu tersebut tidak dipenuhi karena keadaan yang diluar kekuasaanya;

d. dalam hal tidak diajukan keberatan atas SPPT yang dimohonkan pengurangan.

Pasal 43...

Pasal 43

Persyaratan permohonan pengurangan yang diajukan secara kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, meliputi:

a. satu permohonan untuk beberapa SPPT tahun pajak yang sama;
b. permohonan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya persentase pengurangan yang dimohon disertai alasan yang jelas;
c. permohonan diajukan kepada Bupati melalui:
   1. Pengurus Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) setempat untuk pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a; dan
   2. Lurah/Kepala Desa setempat, untuk pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf b angka 4 dan angka 5;
d. fotocopy KTP dan/atau Kartu Identitas sejenis untuk semua pemohon; dan
e. fotocopy SPPT yang dimohonkan pengurangan.

Pasal 44

(1) Dokumen pendukung untuk permohonan wajib pajak yang diajukan secara kolektif oleh pengurus Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf c angka 1, berupa:
   a. fotocopy kartu anggota veteran tiap-tiap wajib pajak; dan
   b. fotocopy bukti pelunasan PBB tiap-tiap wajib pajak tahun pajak sebelumnya.

(2) Dokumen pendukung untuk permohonan wajib pajak yang diajukan secara kolektif oleh Lurah/Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf c angka 2, berupa:
   a. surat keterangan yang mendukung alasan permohonan dari Lurah/Kepala Desa setempat atau instansi terkait;
   b. fotocopy bukti pelunasan PBB tiap-tiap wajib pajak tahun pajak sebelumnya.

Pasal 45...

Pasal 45

(1) Keputusan pengurangan dapat mengabulkan seluruhnya atau sebagian atau menolak permohonan wajib pajak.
(2) Keputusan pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan berdasarkan Hasil Penelitian Kantor, dan apabila diperlukan dapat dilanjutkan dengan Penelitian di lapangan.
(3) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan berdasarkan surat tugas dan hasilnya dituangkan dalam laporan hasil penelitian pengurangan PBB.
(4) Wajib Pajak yang telah diberikan suatu Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat lagi mengajukan permohonan pengurangan untuk SPPT, SKPD PBBdan STPD PBB yang sama.

Pasal 46

(1) Bupati atau Kepala Dinas Pendapatan Daerah sesuai kewenangannya dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan pengurangan harus memberi suatu keputusan atas permohonan pengurangan.
(2) Kepala Dinas Pendapatan Daerah berwenang memberikan keputusan atas permohonan pengurangan dalam hal PBB terutang sampai dengan Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk satu ketetapan pajak.
(3) Bupati berwenang memberikan keputusan atas permohonan pengurangan dalam hal PBB terutang lebih dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk satu ketetapan pajak.

Pasal 47

Tanggal diterimanya permohonan pengurangan, yaitu:

a. tanggal tanda pengiriman surat permohonan pengurangan, dalam hal disampaikan melalui pos/ekpedisi pengiriman lainnya dengan tanda bukti pengiriman surat; atau

b. tanggal...

b. tanggal terima surat permohonan pengurangan dalam hal diajukan secara langsung oleh wajib pajak atau kuasanya kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pendapatan Daerah.

Pasal 48

(1) Bupati atau Kepala Dinas Pendapatan Daerah memberikan keputusan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya permintaan pengurangan sanksi administratif yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1).
(2) Kepala Dinas Pendapatan Daerah berwenang memberikan keputusan atas permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif sampai dengan Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk satu ketetapan pajak.
(3) Bupati berwenang memberikan keputusan atas permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif lebih dari Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk satu ketetapan pajak.
(4) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), didasarkan pada Hasil Penelitian Kantor, dan apabila diperlukan dapat dilanjutkan dengan Penelitian di lapangan.
(5) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dapat mengabulkan seluruhnya atau sebagian atau menolak permintaan.
(6) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan berdasarkan surat tugas dan hasilnya dituangkan dalam laporan hasil penelitian pengurangan atau penghapusan sanksi administratif.

BAB VI

PENGAJUANDAN PENYELESAIAN KEBERATAN

Pasal 49

Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah atas:

a. SPPT; dan
b. SKPD;

Pasal 50...

Pasal 50

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan dalam hal:
   a. wajib pajak berpendapat bahwa luas objek pajak bumi tidak sebagaimana mestinya;
   b. wajib pajak berpendapat bahwa luas objek pajak bangunan tidak sebagaimana mestinya; dan/atau
   c. nilai jual objek pajak bumi dan/atau bangunan tidak sebagaimana mestinya.

(2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diajukan secara:
   a. perorangan atau kolektif untuk SPPT PBB Perkotaan perdesaan; atau
   b. perorangan untuk SKPD PBB Perkotaan perdesaan.

Pasal 51

(1) Pengajuan keberatan SPPT PBB secara perorangan atau kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf a, dilakukan untuk SPPT PBB P sampai dengan Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)diajukan secara tertulis kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
   a. asli SPPT PBB atau SKPD PBB, Tahun yang berkenaan;
   b. surat kuasa dalam hal dikuasakan pada pihak lain;
   c. fotokopi KTP, Kartu Keluarga atau Kartu Identitas lainnya dari wajib pajak;
   d. fotokopi bukti pelunasan PBB tahun terakhir;
   e. fotokopi dokumen tanah dan/atau bangunan, antara lain:
      1. sertifikat;
      2. akta jual beli;
      3. izin mendirikan bangunan;
      4. izin penggunaan bangunan; dan
      5. dokumen lainnya yang sejenis.
   f. surat keterangan Lurah/Kepala Desa setempat.

(2). Keberatan...

(2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak diterbitkannya SPPT PBB atau 3 (tiga) bulan sebelum tanggal 31 Juli tahun berkenaan kecuali apabila wajib pajak atau kuasanya dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.

(3) Surat Keberatan yang diajukan harus ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasa yang ditunjuk.

Pasal 52

(1) Pengajuan keberatan untuk SPPT PBBlebih dari Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) hanya dapat dilakukan secara perorangan.

(2) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan secara tertulis kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah dengan melampirkan persyaratan, sebagai berikut:
   a. asli SPPT PBB atau SKPD PBB, Tahun yang berkenaan;
   b. surat kuasa dalam hal dikuasakan pada pihak lain;
   c. fotokopi KTP, Kartu Keluarga atau Kartu Identitas lainnya dari wajib pajak;
   d. fotokopi bukti pelunasan PBB tahun terakhir;
   e. fotokopi dokumen tanah dan/atau bangunan, antara lain:
      1. sertifikat;
      2. akta jual beli;
      3. izin mendirikan bangunan;
      4. izin penggunaan bangunan; dan
      5. dokumen lainnya yang sejenis.
   f. surat keterangan Lurah/Kepala Desa setempat.

(3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak diterbitkannya SPPT PBB atau 3 (tiga) bulan sebelum tanggal 31 Juli tahun berkenaan kecuali apabila wajib pajak atau kuasanya dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.

Pasal 53...

Pasal 53

Tanggal Penerimaan surat keberatan yang dijadikan dasar untuk memproses surat keberatan adalah:

a. tanggal terima surat keberatan, dalam hal disampaikan secara langsung oleh wajib pajak atau kuasanya kepada Dinas Pendapatan Daerah; atau
b. tanggal tanda pengiriman surat keberatan, dalam hal disampaikan melalui pos/jasa pengiriman lainnya dengan bukti pengiriman surat.

Pasal 54

(1) Pengajuan keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 atau Pasal 52, dianggap bukan sebagai surat keberatan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
(2) Dalam hal pengajuan keberatan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak masih dapat mengajukan keberatan kembali sepanjang memenuhi jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3) atau Pasal 52ayat (3).

Pasal 55

Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar PBB Perkotaan Perdesaanyang terutang dan pelaksanaan penagihannya.

Pasal 56

Keputusan atas pengajuan keberatan SPPT PBB Perkotaan Perdesaan, SKPD PBB Perkotaan Perdesaan, SKPDLB PBB PerkotaanPerdesaan diberikan oleh:

a. Kepala Dinas Pendapatan Daerah, dalam hal jumlah PBB yang terutang sampai dengan Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah); dan
b. Bupati, dalam hal jumlah PBB Perkotaan yang terutang lebih dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 57...

Pasal 57

(1) Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, ditetapkan berdasarkan hasilpemeriksaan dan apabila diperlukan, dapat dilanjutkan dengan penelitian dilapangan.

(2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan surat tugas dan hasilnya dituangkan dalam laporan hasil penelitian.

(3) Dalam hal dilakukan penelitian di lapangan, terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis waktu pelaksanaan penelitian dilapangan kepada Wajib Pajak.

Pasal 58

(1) Keputusan Kepala DinasPendapatan Daerah atas pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf a, disertai laporan hasil penelitian keberatan diberikan paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal diterimanya pengajuan Keberatan.

(2) Kepala Dinas Pendapatan Daerah meneruskan berkas pengajuan Keberatan kepada Bupati disertai laporan hasil penelitian keberatan atas pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf b, dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal diterimanya pengajuan Keberatan.

Pasal 59

(1) Bupati sesuai kewenangannya dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas)bulan terhitung sejak tanggal diterimanya surat Keberatan, harus memberikan keputusan atas pengajuan Keberatan kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf b.

(2) Keputusan Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya jumlah PBB Perkotaan Perdesaan yang terutang.

(3). Apabila...

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah terlampaui dan keputusan belum diterbitkan, pengajuan Keberatan dianggap dikabulkan dan diterbitkan keputusan sesuai dengan pengajuan Wajib Pajak dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak jangka waktu dimaksud berakhir.

(4) Dalam hal keputusan Keberatan menyebabkan perubahan data dalam SPPT dan SKPD PBB Perkotaan Perdesaan , Dinas Pendapatan Daerah menerbitkan SKPDKB, SKPDLB dan SKPDN PBB PerkotaanPerdesaan berdasarkan keputusan Keberatan tanpa mengubah saat jatuh tempo pembayaran.

(5) SKPDKB, SKPDLB dan SKPDN PBB PerkotaanPerdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tidak bisa diajukan Keberatan.

Pasal 60

Bentuk formulir yang digunakan dalam rangka pengajuan dan penyelesaian keberatan PBB ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah.

BAB VII
TATA CARA PENGAMBILAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 61

(1) Kelebihan pembayaran pajak terjadi apabila:
   a. pajak yang dibayar ternyata lebih besar dari yang seharusnya tertuang;
   b. dilakukan pembayaran pajak yang tidak seharusnya tertuang.

(2) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan kepada Bupati Up Kepala Dinas Pendapatan daerah untuk pengembalian kelebihan pembayaran pajak.

(3) Formulir permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran X Peraturan Bupati ini.

Pasal 62

(1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) harusmemenuhi persyaratan:
   a. permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya kelebihan pembayaran pajak;
   b. permohonan dilampiri fotokopi SPPT, SKPD, STPD dan Bukti Pembayaran Pajak yang sah;
   c. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib pajak dan dalam hal ditandatangani oleh bukan wajib pajak berlaku ketentuan sebagai berikut:
      1. surat permohonan harus dilampiri dengan surat kuasa, untuk:
         a. wajib pajak badan; atau
         b. wajib pajak orang pribadi dengan kelebihan pembayaran pajak menurut wajib pajak lebih besar dari Rp. 2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah).
      2. surat permohonan pengemballian yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.

Pasal 63

(1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk memberi keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan.
(2) Apabila dalam kangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberi suatu keputusan, permohonan yang diajukan oleh Wajib Pajak diangap dikabulkan dan diterbitkan keputusan sesuai dengan permohonan yang diajukan.
(3) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang Pajak Lainnya, kelebihan pembayaran pajak langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Pajak dimaksud.

(4) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam waktu Pembayaran lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP)

(5) Formulir SKPDLB sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI Peraturan Bupati ini.

BAB VIII

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK

Pasal 64

(1) Ruang lingkup penghapusan Piutang Pajak yang menjadi kewenangan daerah meliputi kewajiban pokok pajak, bunga dan/atau denda administratif yang tertunggak sampai dengan tanggal terakhir perhitungan pembebanan utang dan telah tercantum dalam SPPT, SKPD, STPD, Surat Keputusan Pembetulan Surat Keputusan Keberatan, surat Keputusan Pengurangan, Penghapusan Sanksi Administratif.

(2) Piutang Pajak yang tercantum dalamSPPT, SKPD, STPD , Surat Keputusan Pembetulan Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pengurangan, Penghapusan Sanksi Administratif berupa bunga dan/atau denda dapat dihapuskan apabila pajak tersebut tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa.

Pasal 65

(1) Piutang Pajak yang tercantum dalam SPPT, SKPD, STPD, Surat Keputusan Pembetulan Surat Keputusan Keberatan, surat Keputusan Pengurangan, Penghapusan Sanksi Administratif berupa bunga dab/atau denda walaupun hak untuk melakukan penagihan belum kadaluarsa dapat dihapuskan apabila piutang pajak daerah tersebut tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi.

(2) Piutang Pajak yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

a. wajib Pajak/Penanggung Pajak meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris;
b. wajib pajak/penanggung pajak tidak mempunyai harta kekayaan lagi;
c. wajib pajak/penanggung pajak dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan, dan darihasil penjualan harta tidak mencukupi untuk melunasi utang pajaknya; dan
d. wajib pajak/penanggung pajak meninggalkan Indonesia untuk selamanya berdasarkan surat Keterangan dari Kepala Lingkungan/Dusun mengetahui Kepala Desa/Lurah.

(3) Wajib Pajak/penanggung pajak yang tidak dapat ditagih lagi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dibuatkan berita acara pemeriksaan dan diumumkan di Kantor Kelurahan/Desa setepat selama 14 (empat belas) hari kerja.

Pasal 66

(1) Piutang Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat 2 terlebih dahulu ditatausahakan sebagai piutang pajak dan telah dilakukan upaya tindakan penagihan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
(2) Piutang Pajak yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi akan tetapi belum kadaluarsa sebagaimana dimaksud dalam pasal 64ayat (1) terlebih dahulu dimasukkan ke dalam buku daftar cadangan Penghapusan Piutang Pajak.

Pasal 67

Piutang Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) tidak dilakukan lagi tindakan penagihan.

Pasal 68

(1) Pada setiap akhir tahun takwim, Dinas Pendapatan Daerah menyampaikan daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak dan Daftar Cadangan Penghapusan Piutang Pajak Kepada Bupati Kutai Timur.

(2). Daftar...

(2) Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak dan daftar Cadangan Penghapusan Piutang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
   a. nama wajib pajak dan penanggung pajak;
   b. alamat wajib pajak/penangung pajak;
   c. nomor objek pajak (NOP);
   d. jenis pajak daerah;
   e. tahun pajak;
   f. jumlah piutang pajak yang akan dihapuskan atau yang akan dicanangkan untuk dihapus;
   g. tindakan penagihan yang pernah dilakukan; dan
   h. alasan dihapuskan atau dicadangkan untuk dihapus.

(3) Penghapusan Piutang Pajak ditetapkan oleh:
   a. Bupati untuk jumlah sampai dengan RP. 5.000.000.000.- (lima miliar rupiah); dan
   b. Bupati dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk Jumlah lebih dari RP. 5.000.000.000.- (lima miliar rupiah).

Pasal 69

(1) Kepala Dinas Pendapatan Daerah setelah menerima daftar Usulan Penghapusan dan Daftar Cadangan Piutang Pajak segera memembentuk Tim untuk melakukan penelitian terhadap wajib pajak yang ada dalam daftar usulan dan cadangan penghapusan piutang pajak.

(2) Pembentukan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kutai Timur.

(3) Dalam hal tertentu kepala Dinas Pendapatan Daerah dapat memerintahkan penyidik Pegawai Negeri Sipil Pajak Daerah dan Juru Sita Pajak Daerah untuk mendampingi Tim.

(4) Dalam melaksanakan tugasnya Tim wajib membawa surat perintah Yang diterbitkan Dinas Pendapatan Daerah.

Pasal 70

(1) Hasil penelitian Tim sebagaimana dimaksud Pasal 69 ayat (1) disampaikan kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah dalam bentuk laporan.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:

a. nama wajib pajak dan penanggung pajak;
b. alamat wajib pajak/penanggung pajak;
c. nomor dan tanggal SPPT/SKPD/STPD/Surat Keputusan Pembetulan/Surat Keputusan Keberatan/Surat Keputusan Pengurangan, Penghapusan sanksi administrasi berupa kenaikan bunga dan/atau denda;
d. jenis pajak daerah;
e. tahun pajak;
f. besarnya piutang pajak yang akan dihapuskan atau yang akan dicanangkan untuk dihapus;
g. tindakan penagihan yang pernah dilakukan;
h. alasan dihapuskan atau dicadangkan untuk dihapuskan; dan
i. keterangan hasil penelitian administrasi dan penelitian lapangan.

Pasal 71

(1) Berdasarkan Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak Daerah yang telah dilakukan penelitian, Kepala Dinas Pendapatan Daerah mengajukan permohonan penghapusan disertai pertimbangan kepada Bupati Kutai Timur.
(2) Penghapusan Piutang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kutai Timur.

Pasal 72

(1) Kepala Dinas Pendapatan Daerah menyampaikan petikan Keputusan Bupati Kutai Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) kepada Instansi terkait lainnya.
(2) Petikan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Dinas Pendapatan Daerah segera mengadministrasikan dan menghapus piutang pajak dari daftar Piutang Pajak Daerah.

BAB IX...

BAB IX

KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 73

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan dalam hal:
   a. wajib pajak berpendapat bahwa luas objek pajak atau NJOP tidak sebagaimana mestinya; dan/atau
   b. terdapat perbedaan penafsiran peraturan Pajak.

(2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan secara:
   a. perseorangan atau kolektif untuk SPPT; atau
   b. Perseorangan untuk SKPD.

Pasal 74

(1) Pengajuan Keberatan secara perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) harus memenuhi persyaratan:
   a. satu surat keberatan untuk 1 (satu) SPPT atau SKPD;
   b. diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia;
   c. diajukan kepada Bupati Kutai Timur atau Pejabat yang ditunjuk;
   d. dilampiri asli SPPT atau SKPD yang akan diajukan keberatan;
   e. dikemukakan jumlah pajak yang tertuang menurut perhitungan wajib pajak disertai dengan alasan yang mendukung pengajuan keberatannya;
   f. diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT atau SKPD kecuali apabila wajib pajak atau kuasanya dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaanya; dan
   g. surat keberatan ditandatangani oleh wajib pajak dan dalam hal surat keberatan ditandatangani oleh bukan wajib pajak:
      1. harus dilampiri dengan surat kuasa khusus untuk wajib pajak orang pribadi dengan pajak yang tertuang lebih banyak dari Rp.2.000.000.- (dua juta rupiah) atau wajib pajak badan; atau

2. harus...

2. harus dilampiri dengan surat kuasa untuk wajib pajak orang pribadi dengan pajak yang tertuang paling banyak Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah).

(2) Pengajuan Keberatan secara kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) huruf a harus memenuhi persyaratan:

a. satu pengajuan untuk beberapa SPPT tahun pajak yang sama;
b. diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia;
c. Pajak yang tertuang untuk setiap SPPT Paling banyak Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah);
d. diajukan melalui Kepala Desa/Lurah setempat;
e. dilampiri SPPT yang diajukan keberatan;
f. mengemukakan jumlah pajak yang tertuang menurut penghitungan wajib pajak disertai dengan alasan yang mendukung pengajuan keberatanya; dan
g. diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT, kecuali apabila wajib pajak melalui kepala desa/lurah setempat dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasannya.

(3) Tanggal penerimaan surat keberatan yang dijadikan dasar untuk memproses surat keberatan adalah:

a. tanggal terima surat keberatan, dalam hal disampaikan secara langsung oleh wajib pajak atau kuasanya kepada petugas Dinas Pendapatan Daerah atau petugas lain yang ditunjuk; atau
b. tanggal tanda pengiriman surat keberatan dalam hal disampaikan melalui pos dengan bukti pengiriman surat.

(4) Untuk memperkuat alasan pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan ayat (2) huruf g pengajuan keberatan disertai dengan:

a. fotocopy identitas wajib pajak dan fotokopu identitas kuasa wajib pajak dalam hal dikuasakan;
b. fotocopy bukti kepemilikan tanah;

c. fotocopy...

c. fotocopy ijin mendirikan bangunan IMB; dan atau
d. foto copy bukti pendukung lainnya.

Pasal 75

(1) Pengajuan Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) atau ayat (2) dianggap bukan sebagai surat keberatan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
(2) Dalam hal pengajuan Keberatan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal penerimaan Surat Keberatan harus memberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari kepada:
    a. wajib pajak atau kuasanya dalam hal pengajuan keberatan secara perseorangan; atau
    b. Kepala Desa/Lurah setempat dalam hal pengajuan keberatan secara kolektif.
(3) Dalam hal pengajuan Keberatan tidak dapat dieprtimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib pajak masih dapat mengajukan keberatan kembali sepanjang memenuhi jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf f dan ayat (2) huruf h.

Pasal 76

(1) Untuk keperluan pengajuan Keberatan wajib pajak dapat meminta Keterangan secara tertulis mengenai dasar pengenaan dan/atau penghitungan pajak yang tertuang kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
(2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk memberi keterangan yang diminta oleh wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak surat permintaan wajib pajak diterima.

(3). Jangka...

(3) Jangka waktu pemberian keterangan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas permintaan wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menunda jangka waktu pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 64 ayat (1) huruf f dan ayat (2) huruf H.

Pasal 77

Keberatan dapat diajukan apabila wajib pajak telah membayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui wajib pajak.

Pasal 78

(1) Pejabat yang ditunjuk berwenang memberikan Keputusan atas pengajuan keberatan dalam hal pajak yang tertuang paling banyak Rp. 1.500.000.000.- (satu milliar lima ratus juta rupiah).
(2) Bupati berwenang memberikan keputusan atas pengajuan keberatan dalam hal pajak yang tertuang lebih banyak dari Rp. 1.500.000.000.- (satu milliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 79

(1) Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan berdasarkan hasil penelitian kantor dan apabila diperlukan dapat dilanjutkan dengan penelitian lapangan
(2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan surat tugas dan hasilnya dituangkan dalam laporan hasil penelitian
(3) Dalam hal dilakukan penelitian dilapangan, pejabat pada Dinas Pendapatan Daerah terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis waktu pelaksanaan penelitian dilapangan kepada wajib pajak.

Pasal 80

(1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan surat keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (3) memberi suatu keputusan atas pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) atau ayat (2).

(2). Keputusan...

(2) Keputusan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian menolak atau menambah besarnya jumlah pajak yang tertuang.

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui dan keputusan belum diterbitkan, pengajuan keberatan dianggap dikabulkan dan diterbitkan Keputusan sesuai dengan pengajuan wajib pajak dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak jangka waktu dimaksud berakhir.

(4) Dalam hal keputusan Keberatan menyebabkan perubahan data dalam SPPT atau SKPD Dinas Pendapatan Daerah Menerbitkan SPPT atau SKPD baru berdasarkan Keputusan Keberatan tanpa merubah saat jatuh tempo pembayaran.

(5) SPPT atau SKPD baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bisa diajukan keberatan.

Pasal 81

Dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan Keputusan sebagaimana diamksud dalam Pasal 62 ayat (1) wajib pajak dapat menyampaikan alasan tambahan atau penjelasan tertulis sepanjang surat keputusan keberatan belum diterbitkan.

Pasal 82

Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada pengadilan pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Bupati.

BAB X

TARIF DAN CARA MENGHITUNG PAJAK

Pasal 83

(1) Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan ditetapkan sebagai berikut:

a. untuk NJOP sampai dengan Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,1 % (nol koma satu persen);

b. untuk...

b. untuk NJOP diatas Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,2 % (nol koma dua persen);

c. untuk NJOP diatas Rp. 80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,3 % (nol koma tiga persen);

(2) Penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tersebut dalam Lampiran XII.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 84

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di Undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 31 Desember 2013
BUPATI KUTAI TIMUR,

H. ISRAN NOOR

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR : 44 Tahun 2013
TANGGAL : 31 Desember 2013

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR
DINAS PENDAPATAN DAERAH

SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK

No. Formulir

Selain yang diisi oleh Petugas (bagian yang diarsir), diisi oleh ajib Pajak.
Beri Tanda silang pada kolom yang sesuai

DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR

1. JENIS TRANSAKSI ☐ 1. Perekaman Data ☐ 2. Pemutakhiran Data ☐ 3. Penghapusan Data

	PR	DT II	KEC	KEL/DES	BLOK	NO URUT	KODE
2. NOP							
3. NOP BERSAMA							

A. INFORMASI TAMBAHAN UNTUK DATA BARU

4. NOP ASAL
5. NO SPPT LAMA

B. DATA LETAK OBJEK PAJAK

6. NAMA JALAN
7. BLOK/KAV/NOMOR
8. KELURAHAN / DESA
9. RW
10. RT

C. DATA SUBJEK PAJAK

11. STATUS ☐ 1. Pemilik ☐ 2. Penyewa ☐ 3. Pengelola ☐ 4. Pemakaian ☐ 5. Sengketa
12. PEKERJAAN ☐ 1. PNS *) ☐ 2. ABRI ☐ 3. Pensiunan *) ☐ 4. Badan ☐ 5. Lainnya
13. NAMA SUBJEK PAJAK
14. NPWP
15 NAMA JALAN
16. BLOK / KAV/NOMOR
17. KELURAHAN / DESA
18. RW
19. RT
20 KABUPATEN / KOTAMADYA-KODE POS
21. NOMOR KTP

D. DATA TANAH

22. LUAS TANAH (M2)
23. ZONA NILAI TANAH
24. JENIS TANAH ☐ 1. Tanah + Bangunan ☐ 2. Kavling Siap Bangun ☐ 3. Tanah Kosong ☐ 4. Fasilitas Umum

Catatan : *) yang penghasilannya semata-mata berasal dari gaji atau uang pensiunan

dilanjutkan di halaman berikutnya

E. DATA BANGUNAN

25. JUMLAH BANGUNAN

F. PERNYATAAN SUBJEK PAJAK

Saya menyatakan bahwa informasi yang telah saya berikan dalam formulir ini termasuk lampirannya adalah benar, jelas dan lengkap menurut keadaan yang sebenarnya, sesuai dengan Pasal 83 ayat (2) Undang-Undang No. 28 Tahun 2009

26. NAMA SUBJEK PAJAK / KUASANYA	27. TANGGAL	28. TANDA TANGAN

- Dalam hal bertindak selaku kuasa, Surat Kuasa harap dilampirkan
- Dalam hal subjek Pajak mendaftarkan sendiri Objek Pajak, Supaya menggambarkan Sket/Denah Lokasi Objek Pajak
- Batas waktu pengembalian SPOP 30 (tiga puluh) hari sejak diterima Objek Subjek Pajak sesuai Pasal 83 ayat (2) UU No. 28 Tahun 2009

G. IDENTITAS PENDATA / PEJABAT YANG BERWENANG

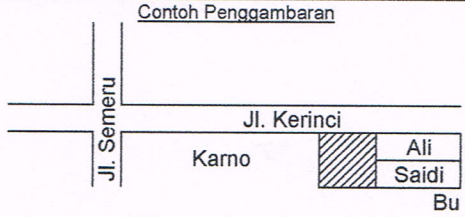
PETUGAS PENDATA		MENGETAHUI PEJABAT YANG BERWENANG	
29. TANGGAL (TGL/BLN/THN)	/ /	33. TANGGAL (TGL/BLN/THN)	/ /
30. TANDA TANGAN		34. TANDA TANGAN	
31. NAMA JELAS		35. NAMA JELAS	
32. NIP		36. NIP	

SKET / DENAH LOKASI OBJEK PAJAK

KETERANGAN :

- Gambar Sket/Denah Lokasi objek pajak (tanpa skala), yang dihubungkan dengan jalan raya/ jalan protokol, jalan lingkungan dan lain-lain, yang mudah diketahui oleh umum.
- sebutkan batas-batas pemilikan sebelah utara, selatan, timur, dan barat

Contoh Penggambaran



LAMPIRAN SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK

No. Formulir ☐ ☐☐☐☐ ☐☐☐

1. JENIS TRANSAKSI ☐ 1. Perekaman Data ☐ 2. Pemukiman Data ☐ 3. Penghapuan Data ☐ 4. Penilaian Individual

	PR	DT II	KEC	KEL/DES	BLOK	NO URUT	KODE	
2. NOP	☐☐	☐☐	☐☐☐	☐☐☐	☐☐☐	☐☐☐☐	☐	3. JUMLAH BNG ☐☐☐ 4. BANGUNAN KE ☐☐☐

A. RINCIAN DATA BANGUNAN

5. JNS PENGGUNAAN BANGUNAN
☐ 1. Perumahan ☐ 2. Perkantoran Swasta ☐ 3. Pabrik
☐ 4. Toko/Apotik/Pasar/Ruko ☐ 5. Rumah Sakit/Klinik ☐ 6. Olah Raga/Rekreasi
☐ 7. Hotel / Wisma ☐ 8. Bengkel/Gudang/Pertanian ☐ 9. Gedung Pemerintahan
☐ 10. Lain-Lain ☐ 11. Bng Tidak Kena Pajak ☐ 12. Bangunan Parkir
☐ 13. Apartemen ☐ 14. Pompa Bensin ☐ 15. Tangki Minyak
☐ 16. Gedung Sekolah

6. LUAS BANGUNAN (M2) ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐ 7. JUMLAH LANTAI ☐☐

8. THN DIBANGUN ☐☐☐☐

9. THN DIRENOVASI ☐☐☐☐ 10. DAYA LISTRIK TERPASANG (WATT) ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

11. KONDISI PADA UMUMNYA ☐ 1. Sangat Baik ☐ 2. Baik ☐ 3. Sedang ☐ 4. Jelek

12. KONSTRUKSI ☐ 1. Baja ☐ 2. Beton ☐ 3. Batu Bata ☐ 4. Kayu

13. ATAP ☐ 1. Decrabon/ Beton/Gtg Glazur ☐ 2. Gtg. Beton/ Alumunium ☐ 3. Gtg. Biasa Sirap ☐ 4. Asbes ☐ 5. Seng

14. DINDING ☐ 1. Kaca / Alumunium ☐ 2. Beton ☐ 3. Batu Bata/ Conblok ☐ 4. Kayu ☐ 5. Seng ☐ 6. Tidak Ada

15. LANTAI ☐ 1. Marmer ☐ 2. Keramik ☐ 3. Teroso ☐ 4. Ubin PC/ Papan ☐ 5. Semen

16. LANGIT-LANGIT ☐ 1. Akustik/ Jati ☐ 2. Triplek/Asbes ☐ 3. Tidak Ada Bambu

B. FASILITAS

17. JUMLAH AC ☐ ☐

18. AC Sentral ☐ 1. Ada ☐ 1. Tidak Ada

19. LUAS KOLAM RENANG (M2) ☐☐☐☐
☐ 1. Diplester ☐ 2 Dengan Pelapis

20. LUAS PERKERASAN HALAMAN (M2)
☐☐☐☐☐ Ringan ☐☐☐☐☐ Berat
☐☐☐☐☐ Sedang ☐☐☐☐☐ Dengan Penutup Lantai

21. JUMLAH LAPANGAN TENIS DGN LAMPU
☐☐ Beton ☐☐
☐☐ Aspal ☐☐
☐☐ Tanah Liat/ Rumput ☐☐

22. JUMLAH LIFT
☐☐ Penumpang
☐☐ Kapsul
☐☐ Barang

23. JUMLAH TANGGA BERJALAN
Lbr = 0,80 M ☐
Lbr > 0,80 M ☐

24. PANJANG PAGAR (M) ☐☐☐☐
BAHAN PAGAR ☐ 1. Baja/Besi ☐ 2. Bata/ Batako

25. PEMADAM KEBAKARA
☐ 1. Hydrat ☐ 1. Ada ☐ 2. Tidak Ada
☐ 2. Sprinkler ☐ 1. Ada ☐ 2. Tidak Ada
☐ 3. Fire Al ☐ 1. Ada ☐ 2. Tidak Ada

26. JML. SALURAN PES. PABX ☐☐☐☐

27. KEDALAMAN SUMUR ARTESIS (M) ☐☐☐

C. DATA TAMBAHAN UNTUK JPB + 3 / B

☐ PABRIK / BENGKEL / GUDANG / PERTANIAN (JPB = 3 / 8)

26. TINGGI KOLOM (M) ☐☐ 29. LEBAR BENTANG (M) ☐☐

30. DAYA DUKUNG LANTAI (Kg/M2) ☐☐☐☐ 30. KELILING DINDING (M) ☐☐☐☐ 32. LUAS MAZZANINE (M2) ☐☐☐☐

D. DATA TAMBAHAN UNTUK BANGUNAN NON - STANDARD

☐ PERKANTORAN SWASTA / GEDUNG PEMERINTAH (JPB = 2/9)

33. KELAS BANGUNAN ☐ 1. Kelas 1 ☐ 2. Kelas 2 ☐ 3. Kelas 3 ☐ 4. Kelas 4

☐ TOKO / APOTIK / PASAR / RUKO (JPB = 4)

34. KELAS BANGUNAN ☐ 1. Kelas 1 ☐ 2. Kelas 2 ☐ 3. Kelas 3

☐ RUMAH SAKIT / KLINIK (JBP = 5)

35. KELAS BANGUNAN ☐ 1. Kelas 1 ☐ 2. Kelas 2 ☐ 3. Kelas 3

36. LUAS KMR DNG AC SENTRAL (M2) ☐☐☐☐ 37. LS RUANG LAIN DNG AC SENTRAL (M2) ☐☐☐☐

☐ OLAH RAGA / REKREASI (JBP = 6)

38. KELAS BANGUNAN ☐ 1. Kelas 1 ☐ 2. Kelas 2

☐ HOTEL / WISMA (JBP = 7)

39. JENIS HOTEL ☐ 1. Non - Resort ☐ 1. Resort

40. JML BINTANG ☐ 1. Bintang 5 ☐ 2. Bintang 4 ☐ 3. Bintang 3 ☐ 4. Bintang 1-2 ☐ 4. Non Bintang

41. JUMLAH KAMAR ☐☐☐☐ 42. LU KMR DNG AC SENTRAL (M2) ☐☐☐☐ 43. LS RUANG LAIN DNG AC SENTRAL (M2) ☐☐☐☐

☐ BANGUNAN PARKIR (JBP = 12)

44. TIPE BANGUNAN ☐ 1. Tipe 4 ☐ 2. Kelas 3 ☐ 3. Tipe 2 ☐ 4. Tipe 1

☐ APARTEMEN (JBP = 13)

45. KELAS BANGUNAN ☐ 1. Kelas 1 ☐ 2. Kelas 2 ☐ 3. Kelas 3 ☐ 4. Kelas 4

46. JML APARTEMEN ☐☐☐☐☐ 47. LUAS APT DNG AC SENTRAL (M2) ☐☐☐☐☐ 48. LS RUANG LAIN DNG AC SENTRAL (M2) ☐☐☐☐☐

☐ TANGKI MINYAK (JBP = 15)

49. KAPASITAS TANGKI (M3) ☐☐☐☐☐ 50. LETAK TANGKI ☐ 1. Diatas Tanah ☐ 2. Di Bawah Tanah

☐ GEDUNG SEKOLAH (JBP = 16)

51. KELAS BANGUNAN ☐ 1. Kelas 1 ☐ 2. Kelas 2

E. PENILAIAN INDIVIDUAL (X 1000 Rp.)

52. NILAI SISTEM ☐☐☐☐☐☐☐☐☐ 53. NILAI INDIVIDUAL ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

F. IDENTITAS PENDATA / PEJABAT YANG BERWENANG

PETUGAS PENDATA	MENGETAHUI PEJABAT YANG BERWENANG
54. TGL KUNJUNGAN KEMBALI ☐☐/☐☐/☐☐	
55. TGL PENDATAAN ☐☐/☐☐/☐☐	59. TGL. PENELITIAN ☐☐/☐☐/☐☐
56. TANDA TANGAN	60. TANDA TANGAN
57. NAMA JELAS _____	61. NAMA JELAS _____
58. NIP ☐☐/☐☐/☐☐	62. NIP ☐☐/☐☐/☐☐

BUPATI KUTAI TIMUR,

H. ISRAN NOOR

LAMPIRAN II a
PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR : 44 Tahun 2013
TANGGAL : 31 Desember 2013



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR
DINAS PENDAPATAN DAERAH

SPPT PBB
BUKAN MERUPAKAN BUKTI KEPEMILIKAN HAK

SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN

AKUN :

NOP :

LETAK OBJEK PAJAK	NAMA DAN ALAMAT WAJIB PAJAK
	NPWP :

OBJEK PAJAK	LUAS (M2)	KELAS	NJOP PER M2 (Rp)	TOTAL NJOP (Rp)

NJOP Sebagai dasar pengenaan PBB =
NJOPTKP (NJOP Tidak Kena Pajak) =
NJOP untuk penghitungan PBB =
NJKP (Nilai Jual Kena Pajak) =
PBB yang Terhutang =

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN YANG HARUS DIBAYAR (Rp)

TGL. JATUH TEMPO :
TEMPAT PEMBAYARAN :

KEPALA DINAS

Ir. Hj Yulianti
NIP. 196107281990032001

NAMA WP :
Letak Objek Pajak : Kecamatan
Desa/Kelurahan
NOP :
SPPT Tahun/Rp. :

Diterima tgl :
Tanda Tangan :
( )
Nama Terang

BUPATI KUTAI TIMUR,

H. ISRAN NOOR

LAMPIRAN II b
PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR : 44 Tahun 2013
TANGGAL : 31 Desember 2013

Nama Petugas : **Tanda Tangan Petugas :**

Diserahkan ke Wajib Pajak tanggal :

PERHATIAN

1. Apabila dalam SPPT terdapat hal-hal yang meragukan (coretan, tip-ex dan lain-lain), Wajib Pajak dapat menghubungi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur.
2. Pajak yang terhutang harus dibayar sekaligus selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) ini.
3. Pajak yang terhutang hanya dapat dibayar pada Tempat Pembayaran yang ditentukan pada SPPT ini.
4. Bukti Pelunasan pembayaran PBB yang sah adalah :
   Surat Tanda Terima Setoran (STTS) untuk pembayaran secara langsung atau melalui petugas pemungut.
5. Apabila pembayaran pajak dilaksanakan dengan transfer/pemindahbukuan/pengiriman uang melalui Bank/ Kantor Pos, agar mencantumkan nama Wajib Pajak, Nomor Objek Pajak, NPWP dan Kode Akun.
6. Pajak yang terhutang yang tidak dibayar pada tanggal jatuh tempo, dikenakan sanksi sebagai berikut:
   a) Denda Administrasi sebesar 2% sebulan dari jumlah pajak yang terhutang yang tidak dibayar dan,
   b) Ditagih dengan STP-PBB dan dalam hal STP-PBB tidak dilunasi dilanjutkan dengan Surat Paksa yang diikuti dengan penyitaan dan Pelelangan atas kekayaan Wajib Pajak.
7. Keberatan atas jumlah pajak yang terhutang pada SPPT ini dapat diajukan ke Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT ini.
8. Permohonan pengurangan pajak yang disebabkan karena kondisi tertentu Objek Pajak yang ada hubungannya dengan Wajib Pajak dan atau karena sebab - sebab tertentu lainnya, harus diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak :
   a) diterimanya SPPT ini,
   b) terjadi bencana alam atau sebab - sebab lain yang luar biasa.
9. Batas waktu tersebut pada butir 7 dan 8 dapat diperpanjang jika Wajib Pajak dapat membuktikan bahwa hal tersebut diluar kekuasaannya.
10. Pengajuan keberatan, banding dan pengurangan tidak menunda kewajiban membayar pajak.
11. Apabila objek pajak dipindahtangankan kepada pihak lain, baik seluruh atau sebagian, Wajib Pajak harus melaporkan ke Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur.
12. NJOP sebagai dasar pengenaan PBB pada SPPT ini dapat dipergunakan sebagai dasar pengenaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan atau Bangunan sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 dan Pembayaran Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak Atas Tanah dan atau bangunan sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1994 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 1999.
13. Apabila tanggal jatuh tempo tertulis tanggal :
   a) 31 Oktober, maka bulan I setelah tanggal jatuh tempo adalah tanggal 1 Nopember s/d tanggal 30 Nopember, bulan II adalah tanggal 1 Desember s/d 31 Desember dst.
   b) 10 Oktober, maka bulan I setelah tanggal jatuh tempo adalah 11 Oktober s/d tanggal 10 Nopember, bulan II adalah tanggal 11 Desember s/d 10 Desember dst.

MINTA DAN SIMPANLAH STTS SEBAGAI BUKTI PELUNASAN PBB

Nama Petugas : **Tanda Tangan Petugas :**

Diserahkan ke Wajib Pajak tanggal :

PERHATIAN

1. Apabila dalam SPPT terdapat hal-hal yang meragukan (coretan, tip-ex dan lain-lain), Wajib Pajak dapat menghubungi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur.
2. Pajak yang terhutang harus dibayar sekaligus selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) ini.
3. Pajak yang terhutang hanya dapat dibayar pada Tempat Pembayaran yang ditentukan pada SPPT ini.
4. Bukti Pelunasan pembayaran PBB yang sah adalah :
   Surat Tanda Terima Setoran (STTS) untuk pembayaran secara langsung atau melalui petugas pemungut.
5. Apabila pembayaran pajak dilaksanakan dengan transfer/pemindahbukuan/pengiriman uang melalui Bank/ Kantor Pos, agar mencantumkan nama Wajib Pajak, Nomor Objek Pajak, NPWP dan Kode Akun.
6. Pajak yang terhutang yang tidak dibayar pada tanggal jatuh tempo, dikenakan sanksi sebagai berikut:
   a) Denda Administrasi sebesar 2% sebulan dari jumlah pajak yang terhutang yang tidak dibayar dan,
   b) Ditagih dengan STP-PBB dan dalam hal STP-PBB tidak dilunasi dilanjutkan dengan Surat Paksa yang diikuti dengan penyitaan dan Pelelangan atas kekayaan Wajib Pajak.
7. Keberatan atas jumlah pajak yang terhutang pada SPPT ini dapat diajukan ke Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT ini.
8. Permohonan pengurangan pajak yang disebabkan karena kondisi tertentu Objek Pajak yang ada hubungannya dengan Wajib Pajak dan atau karena sebab - sebab tertentu lainnya, harus diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak :
   a) diterimanya SPPT ini,
   b) terjadi bencana alam atau sebab - sebab lain yang luar biasa.
9. Batas waktu tersebut pada butir 7 dan 8 dapat diperpanjang jika Wajib Pajak dapat membuktikan bahwa hal tersebut diluar kekuasaannya.
10. Pengajuan keberatan, banding dan pengurangan tidak menunda kewajiban membayar pajak.
11. Apabila objek pajak dipindahtangankan kepada pihak lain, baik seluruh atau sebagian, Wajib Pajak harus melaporkan ke Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur.
12. NJOP sebagai dasar pengenaan PBB pada SPPT ini dapat dipergunakan sebagai dasar pengenaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan atau Bangunan sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 dan Pembayaran Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak Atas Tanah dan atau bangunan sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1994 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 1999.
13. Apabila tanggal jatuh tempo tertulis tanggal :
   a) 31 Oktober, maka bulan I setelah tanggal jatuh tempo adalah tanggal 1 Nopember s/d tanggal 30 Nopember, bulan II adalah tanggal 1 Desember s/d 31 Desember dst.
   b) 10 Oktober, maka bulan I setelah tanggal jatuh tempo adalah 11 Oktober s/d tanggal 10 Nopember, bulan II adalah tanggal 11 Desember s/d 10 Desember dst.

MINTA DAN SIMPANLAH STTS SEBAGAI BUKTI PELUNASAN PBB

BUPATI KUTAI TIMUR,

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR : 44 Tahun 2013
TANGGAL : 31 Desember 2013

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR
DINAS PENDAPATAN DAERAH
Kawasan Perkantoran Bukit Pelanggi
Sangatta

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH (SKPD)
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2)

Nomor : Tanggal Penerbitan :	Tahun Pajak : AKUN :
Letak Objek Pajak Alamat : Desa/Kelurahan[1] : Kecamatan : Kabupaten : Kutai Timur Kode Pos :	**Nama Dan Alamat Wajib Pajak** Nama : Alamat : Kabupaten/Kota[1] : Kode Pos :

Data Obek Pajak [2]

OBJEK PAJAK	LUAS (M^3)	KELAS	NJOP PER m^3 (Rp)	TOTAL NJOP (Rp.)
			Total NJOP	Rp.

Perhitungan Pajak yang terutang

1.	NJOP sebagai dasar pengenaan PBB (Total NJOP)	Rp.
2.	Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTK)	Rp.
3.	NJOP untuk penghitungan PBB (angka 1 0 angka 2)	Rp.
4.	Persentase Nilai Jual kena Pajak (KJKP)	%
5.	NJKP (angka 3 x angka 4)	Rp.
6.	6.a. PBB yang terutang (tarif ....% x angka 5)	Rp.
	6.b. Pengenaan Khusus RS Swasta/PTS/Investasi Wilayah Tertentu[1] (...% angka 6.a)	Rp.
7.	PBB yang harus dibayar (angka 6.a atau angka 6.b)	Rp.
8.	Pokok/jumlah[1] PBB yang masih harus dibayar	Rp.
9.	Jumlah yang masih harus dibayar (angka 8 + angka 9)	Rp.

Terbilang : .....
.....

Tanggal Jatuh Tempo Tempat Pembayaran Coret yang tidak perlu	..... a.n.Bupati Kutai Timur Kepala Dinas Pendapatan Daerah

Lampiran III : **SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH (SKPD)**
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2)

Nomor :
Tahun Pajak :
Tanggal Penerbitan :
Tanggal Jatuh Tempo :

Nama Wajib Pajak :
NPWP :
NOP :

Perhitungan Pajak yang terutang

No	Uraian		Jumlah Rupiah Menurut Wajib Pajak/ Ketetapan	Jumlah Rupiah Menurut Fiskus/ Keputusan
(1)	(2)		(3)	(4)
1	Luas Bumi		m^2	m^2
2	Luas Bangunan		m^2	m^2
3	Luas Bumi Bersama		m^2	m^2
4	Luas Bangunan Bersama		m^2	m^2
5	NJOP Bumi per m^2 (kelas ..../Kelas ...)[1]		Rp.	Rp.
6	NJOP Bangunan per m^2 (kelas ..../Kelas ...)[1]		Rp.	Rp.
7	NJOP Bumi Bersama per m^2 (kelas ..../Kelas ...)[1]		Rp.	Rp.
8	NJOP Bangunan Bersama per m^2 (kelas ..../Kelas ...)[1]		Rp.	Rp.
9	NJOP Bumi (angka 1 x angka 5)		Rp.	Rp.
10	NJOP Bangunan (angka 2 x angka 6)		Rp.	Rp.
11	NJOP Bumi Bersama (angka 3 x angka 7)		Rp.	Rp.
12	NJOP Bangunan Bersama (angka 4 x angka 8)		Rp.	Rp.
13	NJOP sebagai dasar pengenaan PBB (angka 9 + angka 10 + angka 11 + angka 12)		Rp.	Rp.
14	Nilai jual objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP)		Rp.	Rp.
15	NJOP untuk penghitungan PBB (angka 13-angka14)		Rp.	Rp.
16	Presentase Nilai Jual Kena Pajak (NJKP)		%	%
17	NJKP (angka 15 x angka 16)		Rp.	Rp.
18	18.a	PBB yang terutang (tarif .....% x angka 17)	Rp.	Rp.
	18.b	Pengenaan khusus RS Swasta/PTS/Investasi Wilayah Tertentu[2] (.....% x angka 18.a)	Rp.	Rp.
19	PBB yang harus dibayar (angka 18.a atau angka 18.b)		Rp.	Rp.
20	Jumlah Pokok PBB yang masih harus dibayar (angka19 kolom (4) – angka 19 kolom (3))			Rp.

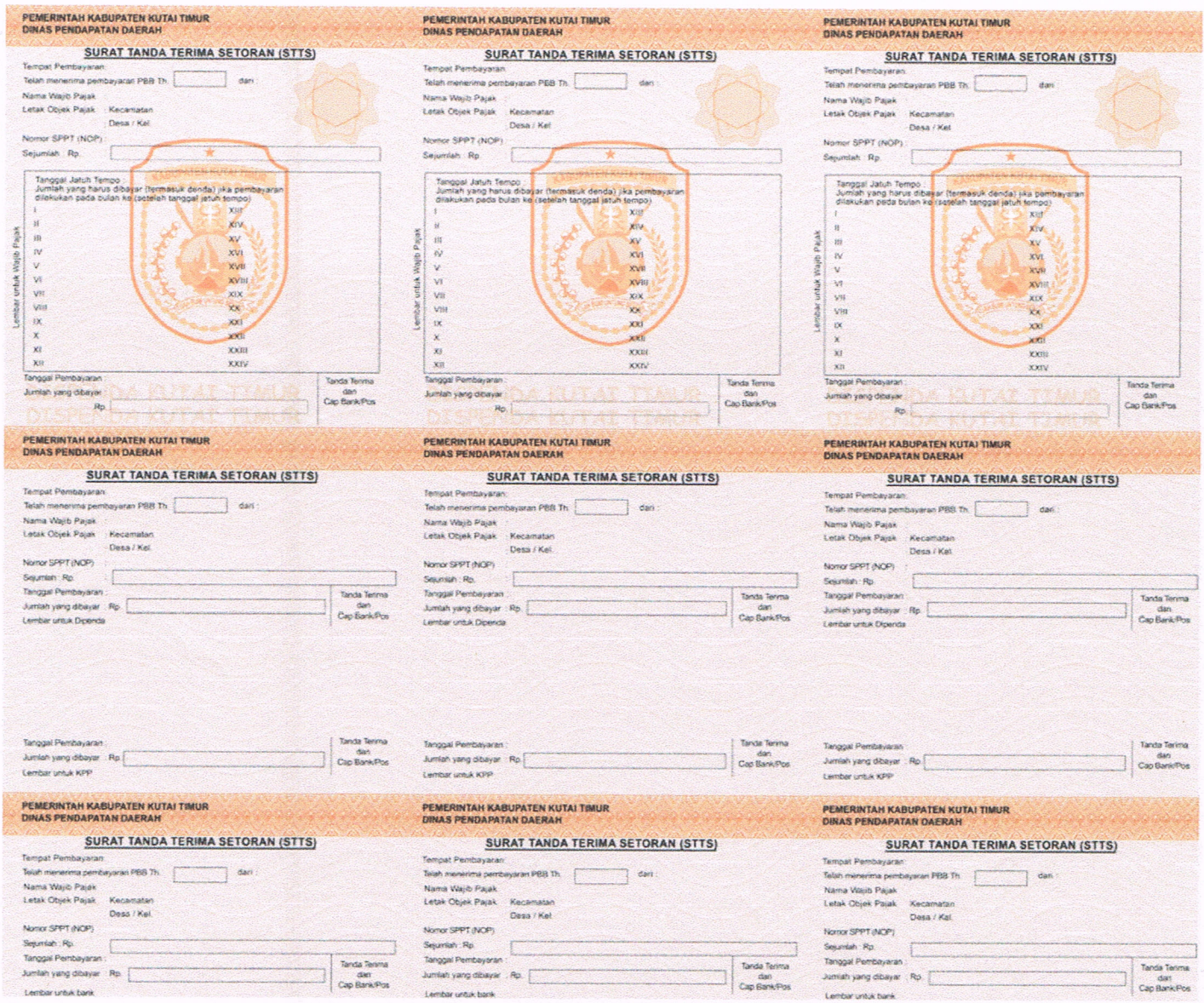
Terbilang : .....
.....

1) Diisi dengan kelas NJOP/m^2 sesuai kolom (3)/Kelas NJOP/m^2 sesuai kolom (4)
2) Coret yang tidak perlu

BUPATI KUTAI TIMUR,

LAMPIRAN IV a
PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR : 44 Tahun 2013
TANGGAL : 31 Desember 2013

EDISI REVISI



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR
DINAS PENDAPATAN DAERAH

SURAT TANDA TERIMA SETORAN (STTS)

Tempat Pembayaran :
Telah menerima pembayaran PBB Th. ____ dari :
Nama Wajib Pajak :
Letak Objek Pajak : Kecamatan :
Desa / Kel. :
Nomor SPPT (NOP) :
Sejumlah : Rp.

Tanggal Jatuh Tempo :
Jumlah yang harus dibayar (termasuk denda) jika pembayaran dilakukan pada bulan ke (setelah tanggal jatuh tempo)

I	XIII
II	XIV
III	XV
IV	XVI
V	XVII
VI	XVIII
VII	XIX
VIII	XX
IX	XXI
X	XXII
XI	XXIII
XII	XXIV

Lembar untuk Wajib Pajak

Tanggal Pembayaran :
Jumlah yang dibayar :
Rp.

Tanda Terima dari Cap Bank/Pos

Lembar untuk Dipenda

Lembar untuk KPP

Lembar untuk bank

EDISI REVISI

LAMPIRAN IV b
PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR : 44 Tahun 2013
TANGGAL : 31 Desember 2013

PERHATIAN

1. STTS merupakan bukti pembayaran PBB yang sah. Untuk kepentingan wajib pajak sendiri, simpanlah STTS dengan baik.
2. Atas Pembayaran Pajak Terutang PBB, tidak dikenakan Bea Meterai sesuai pasal 4.e. UU No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai.

PENJELASAN

1. Apabila tanggal jatuh tempo tanggal 31 Oktober, maka yang dimaksud dengan bulan ke-I adalah tanggal 1 Nopember s/d tanggal 30 Nopember, bulan ke-II adalah tanggal 1 Desember s/d 31 Desember, dst.
2. Apabila tanggal jatuh tempo tanggal 10 Oktober, maka yang dimaksud dengan bulan ke-I adalah tanggal 11 Oktober s/d tanggal 10 Nopember, bulan ke-II adalah tanggal 11 Nopember s/d 10 Desember, dst.
3. L.T. adalah Luas Tanah dalam M^2
   L.B. adalah Luas Bangunan dalam M^2

PERHATIAN

1. STTS merupakan bukti pembayaran PBB yang sah. Untuk kepentingan wajib pajak sendiri, simpanlah STTS dengan baik.
2. Atas Pembayaran Pajak Terutang PBB, tidak dikenakan Bea Meterai sesuai pasal 4.e. UU No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai.

PENJELASAN

1. Apabila tanggal jatuh tempo tanggal 31 Oktober, maka yang dimaksud dengan bulan ke-I adalah tanggal 1 Nopember s/d tanggal 30 Nopember, bulan ke-II adalah tanggal 1 Desember s/d 31 Desember, dst.
2. Apabila tanggal jatuh tempo tanggal 10 Oktober, maka yang dimaksud dengan bulan ke-I adalah tanggal 11 Oktober s/d tanggal 10 Nopember, bulan ke-II adalah tanggal 11 Nopember s/d 10 Desember, dst.
3. L.T. adalah Luas Tanah dalam M^2
   L.B. adalah Luas Bangunan dalam M^2

PERHATIAN

1. STTS merupakan bukti pembayaran PBB yang sah. Untuk kepentingan wajib pajak sendiri, simpanlah STTS dengan baik.
2. Atas Pembayaran Pajak Terutang PBB, tidak dikenakan Bea Meterai sesuai pasal 4.e. UU No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai.

PENJELASAN

1. Apabila tanggal jatuh tempo tanggal 31 Oktober, maka yang dimaksud dengan bulan ke-I adalah tanggal 1 Nopember s/d tanggal 30 Nopember, bulan ke-II adalah tanggal 1 Desember s/d 31 Desember, dst.
2. Apabila tanggal jatuh tempo tanggal 10 Oktober, maka yang dimaksud dengan bulan ke-I adalah tanggal 11 Oktober s/d tanggal 10 Nopember, bulan ke-II adalah tanggal 11 Nopember s/d 10 Desember, dst.
3. L.T. adalah Luas Tanah dalam M^2
   L.B. adalah Luas Bangunan dalam M^2

BUPATI KUTAI TIMUR,

H. ISRAN NOOR

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR : 44 Tahun 2013
TANGGAL : 31 Desember 2013

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN PERKOTAAN

SURAT SETORAN PAJAK DAERAH (SSPD)

	PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR DINAS PENDAPATAN DAERAH Kawasan Perkantoran Bukit Pelanggi Sangatta	**LEMBAR 1** Untuk Penyetor sebagai bukti Pembayaran

SURAT SETORAN PAJAK DAERAH (SSPD)
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2)

A. 1. Nama wajib Pajak :
2. NPWP :
3. Alamat wajib Pajak :

B. 1. NOP : | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

2. Letak Objek Pajak :

Kelurahan/Desa : Kecamatan :

Kabupaten : Kode Pos :

C. 1. Jenis Ketetapan Pajak :
2. Nomor Ketetapan Pajak :

Tahun | | | | |

D. Uraian Pembayaran :

E. Jumlah Pembayaran :
- Pokok Pajak : Rp. Terbilang :
- Denda Administratif : Rp. _____
Jumlah : Rp. _____

F. Kode Akun :

Untuk disetorkan/dipindahkan ke rekening Kas Daerah.
Nomor Rekening : .....

Diterima oleh Kantor Penerimaan Pembayaran ....., Tgl ..... Ttd ..... Nama Jelas	Wajib Pajak/Penyetor ....., Tgl ..... Ttd ..... Nama Jelas

Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran :

SURAT SETORAN PAJAK DAERAH (SSPD)

	PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR DINAS PENDAPATAN DAERAH Kawasan Perkantoran Bukit Pelanggi Sangatta	**LEMBAR 2** Untuk Dinas Pendapatan Daerah

SURAT SETORAN PAJAK DAERAH (SSPD)
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2)

G. 1. Nama wajib Pajak :
2. NPWP :
3. Alamat wajib Pajak :

H. 1. NOP : | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

2. Letak Objek Pajak :

Kelurahan/Desa : Kecamatan :

Kabupaten : Kode Pos :

I. 1. Jenis Ketetapan Pajak :
2. Nomor Ketetapan Pajak :

Tahun | | | | |

J. Uraian Pembayaran :

K. Jumlah Pembayaran :

- Pokok Pajak : Rp. Terbilang :
- Denda Administratif : Rp. _____
Jumlah : Rp. _____

L. Kode Akun :

Untuk disetorkan/dipindahkan ke rekening Kas Daerah.
Nomor Rekening : .....

Diterima oleh Kantor Penerimaan Pembayaran ....., Tgl ..... Ttd ..... Nama Jelas	Wajib Pajak/Penyetor ....., Tgl ..... Ttd ..... Nama Jelas

Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran :

SURAT SETORAN PAJAK DAERAH (SSPD)

	PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR DINAS PENDAPATAN DAERAH Kawasan Perkantoran Bukit Pelanggi Sangatta	**LEMBAR 1** Untuk Bank/Pos Persepsi

SURAT SETORAN PAJAK DAERAH (SSPD)
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2)

M. 1. Nama wajib Pajak :
2. NPWP :
3. Alamat wajib Pajak :

N. 1. NOP : | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

2. Letak Objek Pajak :

Kelurahan/Desa : Kecamatan :

Kabupaten : Kode Pos :

O. 1. Jenis Ketetapan Pajak :
2. Nomor Ketetapan Pajak :

Tahun | | | | |

P. Uraian Pembayaran :

Q. Jumlah Pembayaran :

- Pokok Pajak : Rp. Terbilang :
- Denda Administratif : Rp.
Jumlah : Rp.

R. Kode Akun :

Untuk disetorkan/dipindahkan ke rekening Kas Daerah.
Nomor Rekening : .....

Diterima oleh Kantor Penerimaan Pembayaran ....., Tgl ..... Ttd ..... Nama Jelas	Wajib Pajak/Penyetor ....., Tgl ..... Ttd ..... Nama Jelas

Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran :

PETUNJUK PENGISIAN

A. 1. Diisi dengan nama lengkap Wajib Pajak

2. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak

3. Diisi dengan alamat lengkap tempat tinggal/kedudukan Wajib Pajak

B. 1. Diisi dengan Nomor Onjek Pajak

2. Diisi dengan alamat lengkap lokasi/letak objek pajak

C. 1. Diisi dengan jenis ketetapan pajak (SPPT/SKPD/STPD PBB-P2) yang dibayar

2. Diisi dengan nomor surat ketetapan pajak (SPPT/SKPD/STPD PBB-P2) yang dibayar

D. Diisi dengan uraian jika diperlukan untuk memperjelas jenis/maksud pembayaran

E. Diisi dengan besarnya pokok ketetapaan pajak dalam SPPT/SKPD/STPD PBB-P2, diisi dengan besarnya denda administratif, diisi dengan hasil penjumlahan atas besarnya pokok ketetapan pajak dan denda administratif, dan diisi dengan besarnya total pembayaran dalam huruf.

F. Diisi dengan Kode Akun yang sesuai sebagai berikut :

Sektor	Kode Akun
a. Perdesaan	411311
b. Perkotaan	411312

BUPATI KUTAI TIMUR,

H. ISRAN NOOR

LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR : 44 Tahun 2013
TANGGAL : 31 Desember 2013

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

SURAT PERMOHONAN ANGSURAN/PENUNDAAN PEMBAYARAN

....., ... Tahun .....

Perihal : Permohonan Angsuran/Penundaan Pembayaran

Yth Kepada
Bupati Kutai Timur
Up. Kepala Dinas Pendapatan
Kabupaten Kutai Timur
Di –
Sangatta

Dengan Hormat,
Saya Yang Bertanda Tangan Di Bawah Ini
Nama : .....
Alamat : .....Telp. .....
Bertindak Selaku .....Atas Obyek Pajak PBB :
Nama : .....
NOP : .....
Letak Obyek Pajak : .....
Menyatakan Masih Mempunyai Utang Pajak Berdasarkan : SKPD/STPD/SK Pembetulan/SK Keberatan/Putusan Banding/Putusan Peninjauan Kembali
Tahun Pajak :
No. Ketetapan.Keputusan/Putusan :
Julah Yang Masih Harus Dibayar :
Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran :

Terhadap Utang Pajak Tersebut Diatas, Saya Mengajukan Permohonan Untuk :
1. .....M
engangsur Pembayaran Pajak Sebesar Rp. ..... (.....)[2]
a. Masa Angsuran.....: Kali; Dan
b. Besarnya Angsuran: Rp. (.....)[2]; Atau
2. .....M
enunda Pembayaran Pajak Sebesar Rp. ..... (.....)[2]
sampai dengan tanggal ..... karena saya mengalami kesulitan keuangan/likuiditas[3] (posisi Kas, Bank dan utang piutang per tanggal ..... / mengalami keadaan di luar kekuasaan [1] dengan bukti berupa ..... (terlampir).

Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud diatas, saya bersedia memberikan jaminan berupa :
.....
.....

Hormat Saya,
Pemohon

.....

Keterangan
1. *Coret yang tidak perlu*
2. *Diisi dengan tulisan*
3. *Keterangan likuiditas diisi untuk badan usaha*

BUPATI KUTAI TIMUR,

LAMPIRAN VII
PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR : 44 Tahun 2013
TANGGAL : 31 Desember 2013

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

A. SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH

	PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR **DINAS PENDAPATAN DAERAH** **Kawasan Perkantoran Bukit Pelanggi** **Sangatta**	**TAHUN**
	SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH (STPD) **PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN PERKOTAAN (PBB-P2)** **NOMOR :** **TANGGAL PENERBITAN :**	

Jumlah pajak yang tertuang yang masih harus dibayar	Rp. ..... Dengan huruf :

Letak Objek Pajak	**Nama Dan Alamat Wajib Pajak**
Kabupaten : Kecamatan : Desa/Kelurahan[1)] : Alamat :	
NOP	NPWP

Perincian Pajak yang terutang

1	Pajak yang terutang menurut SPPT/SKPD*) Tahun	Rp.
2	Telah dibayar tanggal	Rp.
3	Pengurangan	Rp.
4	Jumlah yang dapat diperhitungkan (angka2+ angka3)	Rp.
5	Pajak yang kurang dibayar (angka 1-angka 4)	Rp.
6	Denda administrasi 2 % x bulan x Rp. (angka 5)	Rp.
7	Pajak yang terutang berdasarkan putusan Pengadilan Pajak dikurangi angka 1	Rp.
8	Pajak yang masih harus dibayar (5 + 6 + 7)	Rp.

Tanggal Jatuh Tempo :	Tempat Pembayaran :
PERHATIAN 1. STPD ini harus dilunasi paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan 2. Apabila setelah lewat tanggal jatuh tempo utang pajak belum dilunasi, maka tindakan penagihan akan dilanjutkan dengan penerbitan Surat Paksa, pelaksanaan sita lelang.	Mangapura, ... Tahun ..... a.n. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kepala Bidang ....., NIP.
..... *Potong disini dan kirim ke Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur*	
Nama WP NPWP NOP No. STPD Tanggal Penerbitan	Diterima tgl, ... Tahun ..... Penerima Nama lengkap dan tanda tangan

BUPATI KUTAI TIMUR,

LAMPIRAN VIII
PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR : 44 Tahun 2013
TANGGAL : 31 Desember 2013

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

A. SURAT TEGURAN

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR
DINAS PENDAPATAN DAERAH
Kawasan Perkantoran Bukit Pelanggi
Sangatta

....., ... Tahun .....
Kepada :
Yth. Bapak/Ibu/Sdr

Di –
.....

SURAT TEGURAN
Nomor :

Menurut tata usaha kami, hingga saat ini Saudara masih mempunyai tunggakan pajak sebagai berikut :

Jenis Pajak	Tahun Pajak	No. Dan tanggal STPD/SKPD/SK Keberatan/SK Pembetulan/ Putusan Banding *)	Tanggal Jatuh Tempo	Jumlah Tunggakan Pajak (Rp.)
			Jumlah	

Dengan huruf :.....(
.....)

Untuk mencegah tindakan penagihan dengan Surat Paksa, maka diminta kepada Saudara agar melunasi jumlah Tunggakan dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari setelah tanggal Surat Teguran ini. Dalam hal Saudara telah melunasi Tunggakan tersebut diatas, diminta agar Saudara segera melaporkan kepada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur.

PERHATIAN
PAJAK HARUS DILUNASI DALAM WAKTU 21 (DUA PULUH SATU) HARI SETELAH TANGGAL SURAT TEGURAN INI, SESUDAH BATAS WAKTU ITU TINDAKAN PENAGIHAN AKAN DILANJUTKAN DENGAN PENYERAHAN SURAT KUASA

Sangatta, ... Tahun .....
a.n. Kepala Dinas Pendapatan Daerah
Kepala Bidang .....,

NIP.

*) *Coret yang tidak perlu*

BUPATI KUTAI TIMUR,

LAMPIRAN IX
PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR : 44 Tahun 2013
TANGGAL : 31 Desember 2013

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN

SURAT PAKSA

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR
DINAS PENDAPATAN DAERAH
Kawasan Perkantoran Bukit Pelanggi
Sangatta

SURAT PAKSA
Nomor :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR

Menimbang bahwa :
Nama Wajib Pajak/ :
Penaggung NPWP :
Alamat/tempat tinggal :
Menunggak pajak sebagaimana tercantum di bawah ini :

Jenis Pajak	Tahun Pajak	No. Dan tanggal STPD/SKPD/SK Keberatan/SK Pembetulan/ Putusan Banding *)	Jumlah Tunggakan Pajak (Rp.)
		JUMLAH	Rp.

Dengan huruf :.....
(.....
.....)

Dengan ini :
1. Memerintahkan Wajib Pajak/Penanggung Pajak untuk membayar jumlah tunggakan pajak tersebut ke Bank/Pos Persepsi, ditambah dengan biaya penagihan dalam waktu 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam sesudah tanggal pemberitahuan Surat Paksa ini.
2. Memerintahkan kepada Jurusita yang melaksanakan Surat Paksa ini atau Jurusita lain yang ditunjuk untuk melanjutkan pelaksanaan Surat Paksa dengan melakukan penyitaan atas barang-barang milik Wajib Pajak/Penangggung Pajak apabila dalam waktu 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam Surat Paksa ini tidak dipenuhi.

PERHATIAN
PAJAK HARUS DILUNASI DALAM WAKTU 21 (DUA PULUH SATU) HARI SETELAH TANGGAL SURAT TEGURAN INI, SESUDAH BATAS WAKTU ITU TINDAKAN PENAGIHAN AKAN DILANJUTKAN DENGAN PENYERAHAN SURAT KUASA

Mangapura, ... Tahun .....
a.n. Kepala Dinas Pendapatan Daerah
Kepala Bidang .....,

NIP.

*) *Coret yang tidak perlu*

BUPATI KUTAI TIMUR,

LAMPIRAN X
PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR : 44 Tahun 2013
TANGGAL : 31 Desember 2013

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN PERKOTAAN

PERMOHONAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

....., ... Tahun .....

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran PBB-P2 Tahun .....

Kepada
Yth Bupati Kutai Timur
Up. Kepala Dinas Pendapatan
Kabupaten Kutai Timur
Di –
Sangatta

Dengan Hormat,
Saya Yang Bertanda Tangan Di Bawah ini Wajib Pajak / Kuasa Wajib Pajak *)
Nama Wajib Pajak : .....
Alamat : .....Telp. .....
Letak Obyek Pajak : .....
Nomor Induk **) / N OP : .....
Bersama ini mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran PBB-P2 atas SPPT/SKPD/STPD*) Tahun ..... sebesar Rp. .....
dengan huruf (.....)
Bentuk pengembalian yang kami mohon adalah sebagai berikut :

☐ dibayar tunai (restitusi) pada Rek. No. ..... di Bank .....

☐ diperhitungkan (kompensasi) dengan utang/ketetapan PBB*) Th .....

atas nama
Wajib Pajak : .....
Alamat : .....Telp. .....
Letak Obyek Pajak : .....
Nomor Induk **) / N OP : .....
No. Seri : .....

Sebagai bahan petimbangan/penelitian kami lampirkan :

a. Foto Copy : ☐ SPPT, ☐ SKPD, ☐ STPD

b. Foto Copy Salinan Surat keputusan tentang :

Penyelsaian Keberatan

☐ Pemberian Pengurangan/Pengurangan Denda *)

☐ Banding

c. Asli : SSPD ☐ Resi ☐

Hormat Saya,
Pemohon

.....

Keterangan:
**)Coret yang tidak perlu*
***)Diisi dengan tulisan*

☐ *Diisi dengan tanda X pada kotak yang berkenaan yang perlu saja*

BUPATI KUTAI TIMUR,

LAMPIRAN XI
PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR : 44 Tahun 2013
TANGGAL : 31 Desember 2013

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH LEBIH BAYAR

	PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR **DINAS PENDAPATAN DAERAH** **Kawasan Perkantoran Bukit Pelanggi** **Sangatta**	**NO. URUT**
	SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH LEBIH BAYAR (SKPDPLB) **MASA :** **TAHUN :**	

A. WAJIB PAJAK
NAMA
NPWP
ALAMAT

B. SPPT/SKPD/STPD *)
NOMOR
TANGGAL
PBB-P2 TERUTANG

C. OBJEK PAJAK
NOP
ALAMAT
DESA/KELURAHAN
KECAMATAN

I. Berasarkan Perda Kabupaten Kutai Timur Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan telah dilakukan pemeriksaan atau Keterangan Lain atas pelaksanaan kewajiban Wajib Pajak.

II. Dari Pemeriksaan atau Keterangan Lain tersebut diatas, Penghitungan jumlah lebih bayar yang seharusnya tidak terutang adalah sebagai berikut :

No.	Sektor	Nomor Induk Nomor Seri	Jumlah PBB Terutang	Kelebihan Pembayaran	Dikembalikan Degan			
					Dipindah Bukuan	Tunai	Diperhitungkan (Kompensasi)	Disumbangkan Kepada Negara
1	2	3	4	5	6	7	8	9

III. Kelebihan Pembayaran PBB – P2 Tahun ..... sebesar Rp. .....

Dengan Huruf :

PERHATIAN :
Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak dilakukan pada Kas Daerah dengan menggunakan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP).

Sangatta, ... Tahun .....

a.n. Kepala Dinas Pendapatan Daerah,
Kepala Bidang .....,

NIP.

BUPATI KUTAI TIMUR,

LAMPIRAN XII
PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR : 44 Tahun 2013
TANGGAL : 31 Desember 2013

TARIF DAN CARA MENGHITUNG PAJAK

Nilai jual untuk bangunan sebelum diterapkan tarif pajak dikurangi terlebih dahulu dengan Nilai Jual Tidak kena Pajak sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)

Contoh :

a. Untuk wajib pajak yang NJOP nya s/d Rp. 1.000.000.000,-

Wajib pajak A mempunyai objek pajak berupa :
Tanah seluas 800 m^2 dengan harga jual Rp. 300.000,00/ m^2
Bangunan seluas 400 m^2 dengan nilai jual Rp. 350.000,00/ m^2
Taman seluas 200 m2 dengan nilai jual Rp. 50.000,-/m^2
Pagar sepanjang 120 m dan tinggi rata-rata pagar 1,5 m dengan nilai jual Rp. 175.000,00/m^2.

Besarnya pokok pajak yang terutang adalah sebagai berikut:

1. NJOP Bumi : 800 x Rp. 300.000,00 = Rp. 240.000.000,00
2. NJOP Bangunan
   a. Rumah dan garasi
      400 x Rp. 350.000,00 = Rp.140.000.000,00
   b. Taman
      200 x Rp. 50.000,00 = Rp.10.000.000,00
   c. Pagar
      (120 x 1,5) x Rp. 175.000,00 = Rp.31.500.000,00

   Total Nilai Jual Objek Pajak Rp.421.000.000,00
   NJOP Tidak Kena Pajak Rp.10.000.000,00
3. NJOP untuk perhitungan PBB Rp.411.500.000,00
4. Tarif pajak yang ditetapkan 0,1 %
5. PBB terutang : 0,1 % x Rp. 411.500.000,00 = Rp.411.500,00

b. Untuk wajib pajak yang NJOP nya diatas Rp. 1.000.000.000,-

Wajib pajak B mempunyai objek pajak berupa :

Tanah seluas 2000 m^2 dengan harga jual Rp. 400.000,00/ m^2

Bangunan seluas 800 m^2 dengan nilai jual Rp. 350.000,00/ m^2

Taman seluas 400 m2 dengan nilai jual Rp. 50.000,-/m^2

Pagar sepanjang 200 m dan tinggi rata-rata pagar 1,5 m dengan nilai jual Rp. 175.000,00/m^2.

Besarnya pokok pajak yang terutang adalah sebagai berikut:

1.	NJOP Bumi : 2000 x Rp. 400.000,00	=	Rp.800.000.000,00
2.	NJOP Bangunan		
	a. Rumah dan garasi		
	800 x Rp. 350.000,00	=	Rp.280.000.000,00
	b. Taman		
	400 x Rp. 50.000,00	=	Rp.20.000.000,00
	c. Pagar		
	(200 x 1,5) x Rp. 175.000,00	=	Rp.52.500.000,00
	Total Nilai Jual Objek Pajak		Rp.1.152.500.000,00
	NJOP Tidak Kena Pajak		Rp.10.000.000,00
3.	NJOP untuk perhitungan PBB		Rp.1.142.500.000,00
4.	Tarif pajak yang ditetapkan 0,2 %		
5	PBB terutang : 0,1 % x Rp. 1.142.500.000,00	=	Rp.2.285.000,00

BUPATI KUTAI TIMUR,

H. ISRAN NOOR